



**LAPORAN
EVALUASI
PELAKSANAAN RKPD DAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NTB
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

**BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan IV tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi NTB pada Triwulan IV tahun 2021 berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah, Terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2021. Sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2021, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Selain itu, Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2021 secara keseluruhan terdapat 68 indikator atau 66,02 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 29 indikator belum memenuhi target dan masih terdapat 6 indikator belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2021

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan IV tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.380.316.797.911,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.545.293.724.894,00 atau 86,91%. Rincian belanja untuk alokasi anggaran tersebut adalah belanja operasi sebesar Rp. 4.329.221.315.161, belanja modal sebesar Rp. 1.247.827.460.776, belanja tidak terduga sebesar Rp. 44.683.843.539, dan belanja transfer sebesar Rp. 758.584.178.435.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran pada Triwulan IV tahun 2021, dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 108,79 persen dengan capaian keuangan sebesar 98,53 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yaitu sebesar 62,16 persen untuk capaian kinerja, dan 43,82 persen untuk capaian keuangan.

Terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2021. Sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2021, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya adalah Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target antara lain: Angka Harapan Hidup, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Indeks Pelayanan Publik, Pengeluaran per kapita, Pertambahan

Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021, dimana sebanyak 68 indikator atau 66,02 persen sudah tercapai bahkan melampaui target, 29 indikator belum memenuhi target dan masih terdapat 6 indikator belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Sasaran	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021.....	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021	4
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021	5
2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021.....	6
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2021.....	10
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 TRIWULAN IV.....	32
4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 ..	32
4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-20223 sampai tahun 2021	139
4.2.1 Indikator Kinerja Utama.....	139
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah.....	146
BAB V : PENUTUP.....	164
5.1 Kesimpulan.....	164
5.2 Rekomendasi.....	165

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. RPKD Tahun 2021 merupakan perencanaan tahun ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan IV tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2021 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2021;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2021.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2021. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2021. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan IV Tahun 2021. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2021 sampai Triwulan IV.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi:
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :
 - a. Pengembangan Sektor Pariwisata.
 - b. Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.
 - c. Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
 - d. Mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluku (La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan).
 - e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.
3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi :
 - a. Mengendalikan inflasi.
4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
 - a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota.
 - b. Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
 - c. Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - d. Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.
 - e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **"Menuju NTB yang Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"**.

Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu :

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2021 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			Point	123.11	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	78.56
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	B	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23	
				3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang	Indeks Kesehatan	
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78					
	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31.49					

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
	sebagai pondasi daya saing daerah	berdaya saing					
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.39
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	67.72
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.83
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.53
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70
			Neraca pengelolaan sampah			%	70.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	73.80
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.1
					Rasio Elektrifikasi	%	99.77
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021		
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,273		
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	1.50		
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122.71		
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	6.50		
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166.39		
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30		
		6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.85
						Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67
						Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41
Partisipasi politik masyarakat						%	83.74		
	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat				Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						Point	59.81		
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.60			
				Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60			

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2021

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2021 sebanyak 120 program dari 163 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial

102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun Program prioritas dan program unggulan daerah yang dipetakan berdasarkan prioritas daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah**, dengan program prioritas meliputi :
 - a. Mitigasi bencana.
 - b. Infrastruktur dasar.
 - c. Infrastruktur kawasan.
 - d. Konektivitas wilayah.
 - e. Teknologi informasi dan komunikasiSedangkan program unggulannya antara lain: Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Si-AGA, Rumah Layak Huni, Air Bersih untuk Semua, SPAM regional, Jamban Keluarga, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, dan Nusa Terang Bendarang.
- **Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik** , dengan program prioritas meliputi :
 - a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
 - b. Optimalisasi Pendapatan daerah

- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain: eNTeBe Plan, NTB SDGs *centre*, *Research Based Policy*, IC pusat peradaban, NTB WTP, e-Samsat, Samsat Delivery, Bale Mediasi, Kampung Madani, Kampung Media, Sekolah Perjumpaan, NTB Satu Data, Satu Peta, Sakip level A, NTB *care*, Kota Layak Anak, Ramah *Difable*, Manajemen Talenta dan Agen Perubahan.

- **Pembangunan Sumber Daya Manusia**, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- d. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain: Ayo Bercita-cita, 1000 Mahasiswa Luar Negeri, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, dan NTB juara.

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**, dengan program prioritas meliputi:

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain: Tataruang Berkelanjutan, NTB *Zero Waste*, NTB hijau, Cagar Biosfer, Energi Baru Terbarukan, Pertanian Lestari, Desa Mandiri Pangan, Rinjani Tambora Global Geopark, Bank Sampah, Taman Asri.

- **Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata**, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan investor sektor riil
- c. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- f. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa, STIP Inovatif, Industrialisasi Produk Pertanian, Rumah Kemasan, Koperasi Aktif, BUMDes Maju, UMKM Bersaing, NTB Ramah Investasi, Kampung Unggas, HHBK Unggul, 99 Desa Wisata, Apartemen Ikan.

- **Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan**, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Nilai Sosial Budaya dan Toleransi masyarakat.

- b. Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah
- c. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
- d. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sedangkan program unggulannya antara lain: IC pusat peradaban, Bale Mediasi, Kampung Madani, Sekolah Perjumpaan, Kota Layak Anak.

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran
Pembangunan Pada Tahun 2021**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	123.11		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	25.48	4,159	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	44.69		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,446	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	78.56		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	83.95	255,582	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74.55	172,161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	50.83	4,436	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	94.37		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	30		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	46.20		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	59.39	564	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	711,669	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,050	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	60	1,777	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	80	1,079	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	40	2,119	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	5.55	397	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	95	1,571	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	35.20	528	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	50.12	14,608	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,234	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	11,089	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP- nya	%	84,44	827	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	17,77	717	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan	%	80	1,148	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	2,834	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	6,500	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,446	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.03		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.13		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.55		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,70	243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
					Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	871	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	15	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	60	4,644	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	45	1,707	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	20	420	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	30	409	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	75	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	977	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang			Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
Tujuan 3: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang	Indeks Kesehatan	Point	71.97		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
berdaya saing					
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	150,430	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	65		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	80		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2	761	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	30	32	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	83	52,458	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	73.81	7,479	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75.00	36,664	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	31.49		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	12.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	50	1,228	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	62.39		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.15	473,403	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	93,40		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	96.68		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69.4		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1.01		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:14		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	568	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	66,961	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.55		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	70		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	50		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		5.5		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	8,846	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67.72		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.83		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87.53		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	51.52	319	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	20	188	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	197	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	67	19,206	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	885	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	13.27	661	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,449	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.07	681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	70.00		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	70	4,823	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	73.80		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	3	493	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	87	531	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	50	735	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	116	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9	44,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	561	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,779	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	420	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	1.93	20,209	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	35.41	104,379	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan	%	95.5	361	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	DPI				
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	50	5,432	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.53	4,868	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	241,843	6,336	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,195,104	3,023	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.91	4,852	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	213130	616	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	764	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	2.5	17,317	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,091	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	71.97	215	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,517	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	80.00	539	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	76.48	2,936	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.10		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,393	256,813	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.77		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.96	557	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	99.77	1,552	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	1,943	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.81		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol	%	60	280	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	dan Barang Pokok Penting				
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,658	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	3	1,303	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	80	1,253	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,024	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11,273		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	3,704	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	1.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	122.71		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	65.66	4,993	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	37.5		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang	4,650,000	2,240	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%	30.21	165	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	60	1,063	Dinas Pariwisata

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	6.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	166.39		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	27,070	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	2.69	799	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	540	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	5.99	1,280	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	50.32	2,122	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	16	830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	44.71	992	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	21	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	1,014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	14.85		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	458	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10	3,328	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	87,427	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	60	6,798	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	14.43		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	60		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	47.86		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	63.64	1,975	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	390	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	164	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100.00	2,864	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	51.72	730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,711	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	83.74		
	Persentase Keterlibatan Masyrkt dlm politik	%	0.80		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	80	4,654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	79.66	489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59.81		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.6		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	60		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	1,769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	806	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	381	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	361	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		518	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 TRIWULAN IV

4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2021

Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan IV tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.380.316.797.911,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.545.293.724.894,00 atau 86,91%. Rincian belanja untuk alokasi anggaran tersebut adalah belanja operasi sebesar Rp. 4.329.221.315.161, belanja modal sebesar Rp. 1.247.827.460.776, belanja tidak terduga sebesar Rp. 44.683.843.539, dan belanja transfer sebesar Rp. 758.584.178.435.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan IV tahun 2021 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 108,79 persen dengan capaian keuangan sebesar 98,53 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yaitu sebesar 62,16 persen untuk capaian kinerja, dan 43,82 persen untuk capaian keuangan.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatkan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah dengan target kinerja 0,61 dan realisasi sebesar 0,63 atau tingkat capaiannya sebesar 103,28%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB dan Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna dengan target kinerja 25,48% dan 44,69% dan realisasi masing-masing 24,08% dan 37,87% atau dengan tingkat capaian 94,51% dan 84,73%. Dengan demikian capaian program ini tidak memenuhi target. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (sub kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Penanganan Pascabencana Provinsi, Penyusunan Rencana Kontijensi), Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Bencana (sub kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana; Pencarian, Pertolongan, Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana) dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (sub kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan). Dengan adanya refocusing anggaran, pembentukan DESTANA terkoreksi dari 20 Desa menjadi 10 Desa. Meskipun ada penurunan target, tetapi ada dukungan dari Kabupaten untuk pembentukan DESTANA sebanyak 7 Desa, yang terdiri dari KLU 4 Desa, Lombok Barat 1 Desa, Lombok Timur 1 Desa dan Lombok Tengah 1 Desa yaitu yaitu Desa Sepit Kec. Keruak Kab. Lombok Timur, Desa Pringgasela Timur, Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, Desa Bengkaung, Kec. Gunungsari, dan Desa Lembahsari Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat. Sampai dengan tahun 2021 jumlah DESTANA yang terbentuk sebanyak 223 dari 434 DESTANA atau 51,38%.

- b. Program Penanganan Bencana pada Dinas Sosial dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial antara lain pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, seperti bantuan sembako/permakanan, selimut, peralatan kebersihan, terpal/tenda dan sandal. Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi sebanyak 4.906 jiwa.

2. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dengan target 83,95% dan capaian kemantapan jalan sebesar 84,01% atau 100,07% dari target. Untuk meningkatkan kemantapan jalan dan system irigasi, dilakukan dengan: Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan target kinerja sebesar 83,95% dengan realisasi 84,01%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan. Panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 1.484,43 Km dengan kondisi mantap mencapai 1.246,18 Km (83,95%). Tercapainya kemantapan jalan ini dikarenakan adanya dukungan penanganan jalan melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2020 - 2022 (Perda Percepatan

Jalan) dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.

3. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan Sistem Irigasi dengan target 50,04 dan realisasi 50,88% atau tingkat capaian 101,68%. Untuk meningkatkan kemantapan jalan dan system irigasi, dilakukan dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 76,12% dan realisasi 75,52% atau tingkat capaian 99,21%. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi) dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah; Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya; Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai; Rehabilitasi Bendung Irigasi; Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi; Operasional Unit Pengelola Irigasi).

Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 208,05 Km (29 %), sedang 159,28 km (22 %), rusak ringan 125,88 km (17 %) dan rusak berat 228,74 km (32 %).

4. **Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah** dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik dengan target kinerja sebesar 81,71% dengan realisasi mencapai 88,00% atau tingkat capaian 107,70%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Sarana transportasi

darat dalam kondisi baik (target kinerja 50,83 % dengan realisasi 26,69%), Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 94,37 % dengan realisasi 97,50%), Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (target kinerja 30 % dengan realisasi 30%), Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (target kinerja 46,2% dengan realisasi 48,84%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal), Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi), Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi).

Sampai tahun 2021, rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 116 rute dengan penambahan 1 rute angkutan KSPN Pusat Kota Mataram (via Epicentrum Mall) – Sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Secara persentase, pada tahun 2021 capaian rute angkutan darat sebesar 96,67% dari target 92,50% dengan tingkat capaian sebesar 104,50%, sedangkan angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 21 rute dengan penambahan 2 rute angkutan Kayangan – Pototano (Dermaga F3) dan LDF Bima – Surabaya – Labuhan Bajo, sehingga capaian rute angkutan laut sebesar 80,77% dari target 57,69 % dengan tingkat capaian sebesar 140%.

- b. Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39% dengan realisasi 59,39%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan

Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

Pada tahun 2021, jumlah dokumen fasilitasi perizinan angkutan laut sebanyak 30 dokumen, jumlah angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi sebanyak 8 unit, jumlah dokumen badan usaha dipelabuhan yang diawasi sebanyak 78 dokumen sedangkan, jumlah Armada ASDP yang dievaluasi sebanyak 22 unit.

5. **Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** dengan indikator kinerja Opini BPK dengan target status WTP dan realisasi WTP. Sampai dengan tahun 2021, Provinsi NTB berhasil mempertahankan status WTP yang kesepuluh kalinya. Untuk mempertahankan status WTP, dilakukan dengan Kegiatan:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (target kinerja 100 % dengan realisasi 100%); dan Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (target kinerja 100 % dan realisasi 100%). Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 6 kegiatan meliputi : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pengolahan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

Indikator kinerja masing-masing kegiatan secara berturut-turut adalah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun dengan realisasi 6 dokumen; Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Raperda APBD/APBDP Kab/Kota dan Raperda Pertanggungjawaban APBD/APBD Kab/Kota dengan realisasi 31 dokumen; Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang diterbitkan dengan realisasi 101 dokumen; Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun tepat dengan realisasi 83 dokumen; Jumlah Dokumen Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan yang Provinsi dengan realisasi 84 dokumen; Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang tersusun dengan realisasi 103 dokumen.

- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan BMD

pada PD yang akurat dan akuntabel. Target kinerja program ini sebesar 60% dan sudah terealisasi sesuai target. Kegiatan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Target Kinerja 31 Jenis Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan Realisasi Sebesar 31 Jenis Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah. Faktor Penghambat dalam mencapai Target Capaian Kinerja Kegiatan adalah Terbatasnya aparatur di perangkat daerah yang memiliki kompetensi dalam menangani penatausahaan BMD.

Pada tahun 2021, Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 2 dokumen, Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen, Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebanyak 3 Pergub, Jumlah dokumen penatausahaan BMD sebanyak 16 dokumen, Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang Dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan, Jumlah penanganan sengketa aset daerah sebanyak 4 kasus, Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Status Aset 1 laporan, Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, dan Penghapusan BMD sebanyak 10 SK, Jumlah Persetujuan Gubernur/Pemindahtanganan sebanyak 12 dokumen, Jumlah SK Penghapusan BMD sebanyak 14 SK, Jumlah barang milik daerah yang termanfaatkan secara optimal sebanyak 484 BMD, Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebanyak 136 dokumen, dan Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sebanyak 48 dokumen.

- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD dengan target 80% dan realisasi 38,2% dan Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah. Program ini didukung dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan pertama terealisasi sebanyak 54 dokumen laporan hasil pengawasan internal dengan didukung oleh sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Keuangan, Kerjasama Pengawasan Internal, dan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Kegiatan kedua terealisasi sebanyak 20 dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan didukung oleh sub kegiatan Penanganan Penyelesaian, dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan 2 indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu dengan realisasi 55,17% dari target 95% dan indikator Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP dengan realisasi 60,87% dari target 55,33%. Program ini didukung dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi 8 dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi dari target 13 dokumen, sehingga tingkat capainnya sebesar 62%. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan realisasi berupa 8 dokumen laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi.

6. **Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, tercatat target kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi NTB tahun 2021 adalah sebesar 35,41% dimana pada tahun anggaran 2021, PAD terealisasi sebesar Rp1.887.982.527.843,- dan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp5.326.459.032.451,- sehingga realisasi kontribusi PAD terhadap APBD (Pendapatan Daerah) adalah sebesar 35,45%. Dengan demikian kontribusi PAD terhadap APBD provinsi NTB tahun 2021 telah melampaui target dalam RPJMD yakni sebesar 100,11%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal. Target kinerja indikator ini adalah 39,34 % dan realisasi sebesar 35,38% atau tingkat capaian 89,93%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Indikator kinerja Pertumbuhan pendapatan daerah. Realisasi kegiatannya sebesar 2,83% dari target 7,63%. Adapun sub kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan yang sudah terusun 2 dokumen.
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK). Target kinerja indikator ini adalah 55 % dan realisasi sebesar 50,47% atau tingkat capaian 91,76%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Indikator kinerja Pertumbuhan pendapatan asli daerah. Realisasi kegiatannya sebesar 3,67% dari target 14,10%. Adapun sub kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
7. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target kinerja BB dan realisasi BB atau tingkat capaiannya sebesar 100%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan. Target kinerja untuk program ini sebesar 100% dan sudah terealisasi 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan meliputi : Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; (sub kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi); Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (sub kegiatan: Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD; dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota); Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (sub kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi; Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota).

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan perencanaan, pendanaan dan evaluasi sangat minim pertemuan langsung, disebabkan aturan pembatasan maksimal peserta untuk mencegah Covid-19. Sehingga tindak lanjutnya dilaksanakan dengan memaksimalkan pertemuan secara Daring, baik untuk kegiatan perencanaan dan pendanaan maupun kegiatan monitoring dan evaluasi, baik untuk Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota.

- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD. Target kinerja untuk program ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan meliputi: Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA); Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan).

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan rincian : FGD Pendalaman dan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penurunan angka Kemiskinan di Provinsi NTB termasuk dengan Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pencapaian Program Prioritas dan Program Unggulan Urusan Pemerintahan dan Politik termasuk dengan Kabupaten/Kota, Rakor Penyelarasan program prioritas Nasional dan Daerah Bidang Kesehatan dan Pendidikan, FGD Penyiapan Data Pembangunan Daerah, Rapat Koordinasi Stunting Tingkat Provinsi

dan Penilaian Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting di NTB, Tim Percepatan Stunting (GEN) dan Pokja AMPL.

Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) dengan rincian : Laporan Pelaksanaan KEK Mandalika (Semester I dan II), Laporan Koordinasi (Subbid Industri dan Ekraf), Rapat Koordinasi KEK, Rapat Koordinasi dengan OPD Mitra Subbid Industri dan Ekraf, Rapat koordinasi kegiatan penyelarasan SDGs subbid Inkeu, Rapat penyelarasan program/kegiatan/indikator SDGs, Honor Tim Sekretariat Dewan KEK Mandalika, Honor Tim Sekretariat SDGs, Rapat Asistensi OPD Mitra Subbid Industri dan Ekraf, Rapat Investasi dan Keuangan, Asistensi penyelarasan indikator SDGs Kab/Kota, Rakor pengembangan kawasan strategis Samota, FGD Subbid Inpardag, FGD Subbid Inkeu, Rakor Industrialisasi Sinergitas, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) serta Laporan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Laporan Rapat Koordinasi Bidang SDA, Rapat dengan Mitra Subbid SDA, Rapat Koordinasi Bidang SDA, Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Rapat TKPKD, Honor Tim TKPKD, Rapat Koordinasi DBHCHT, Rekonsiliasi DBHCHT, Laporan DBHCHT, Sosialisasi Ketentuan DBHCHT, FGD DBHCHT, Honor Tim Sekretariat DBHCHT, FGD Subbid Pangan dan SDA, Rapat Geopark Rinjani, Rapat Geopark Tambora, Rapat Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Bidang SDA, Honor Tim Perencana Geopark Rinjani dan Tambora, Honor Tim Perencana Kegiatan SDA, Honor Dewan Pelaksana Geopark Tambora, Honor Dewan Pelaksana Geopark Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark.

Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan rincian : Rapat koordinasi DAK, Rapat koordinasi prasarana wilayah, Rapat peningkatan kapasitas KOMIR IPDMIP, Rapat Penyusunan Regulasi/Peraturan Gubernur, Honor PPMU IPDMIP, Honor Sekretariat PPMU IPDMIP, Honor Sekretariat IPDMIP, FGD Subbid Infrastruktur PU dan Perumahan, Rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kewilayahan, Rapat Subbid KSDA, Honor Tenaga Pendukung Perencanaan Wilayah, Rapat Asistensi, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan.

- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya. Target untuk program ini 84,44% dengan realisasi 97% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 114,87%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Indikator kinerja untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal adalah Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar 54 dokumen dari target 68 dokumen. Sedangkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan

Tujuan Tertentu, indikator kinerjanya yaitu jumlah dokumen laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dengan realisasi sebesar 20 dokumen dari target 21 dokumen. Sub kegiatan untuk kegiatan ini yaitu Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Kerjasama Pengawasan Internal; dan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target kinerja sebesar 17,77%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi. Realisasi kegiatan ini sebesar 70 dokumen dari target 71 dokumen. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi dengan indikator kinerja Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat dengan target 80%. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program ini sebanyak 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti hasil penyederhanaan struktur Organisasi dan Persentase PD yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja. Realisasi kegiatan ini adalah 100% dengan didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, dan Penataan Analisis Jabatan. Kegiatan kedua yaitu Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Pelaksanaan PMPRB dan Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan difasilitasi pelaksanaan PMPRB. Kegiatan ini sudah terealisasi 100%, artinya seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota telah dibina pelaksanaan PMPRB-nya oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTB. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.
- f. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah dengan target kinerja

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan dengan 9 sub kegiatan meliputi : Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dan Fasilitasi Penataan Wilayah. Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan sebesar 1 dokumen. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan sub kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah dengan realisasi 1 dokumen. Kegiatan terakhir yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah, Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah dengan realisasi sebesar 1 dokumen.

8. **Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN** dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN dengan target kinerja 0,68 poin dan realisasi 0,69 poin atau tingkat capaian sebesar 100,88%. Dengan demikian capaian program ini sudah memenuhi target. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja yaitu Nilai Aspek Sistem Informasi; Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan; Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi; Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan; dan Nilai Aspek Sistem Informasi. Target kinerja masing-masing indikator secara berturut – turut adalah Nilai sebesar 16, 80, 88, 132 dan 16 dengan realisasi masing-masing indikator sebesar 15, 75, 62.5, dan 112.5. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini terdiri dari 4 kegiatan, meliputi: Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (sub kegiatan : Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Evaluasi Pemberhentian ASN; Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian); Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; dan Pengelolaan Promosi ASN); Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja

ASN; Pengelolaan Assessment Center; Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional; dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional), Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; dan Evaluasi Disiplin ASN).

Capaian Sistem Merit Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi sebesar 90 point, meliputi :
 1. Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan sebesar 35 point;
 2. Nilai Aspek Pengadaan sebesar 40 point
 3. Nilai Aspek Sistem Informasi sebesar 15 point
- b) Nilai Aspek Promosi dan Mutasi meliputi :
Nilai Aspek Promosi dan Mutasi sebesar 25 point;
- c) Nilai Aspek Pengembangan Karir, Perlindungan dan Pelayanan sebesar 51,5 point, meliputi :
 1. Nilai Aspek Pengembangan Karir sebesar 37,5 point
 2. Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan sebesar 14 point
- d) Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin sebesar 112,5 point, meliputi :
 1. Nilai Aspek Manajemen Kinerja sebesar 75 point;
 2. Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin sebesar 37,5 Point
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial (target kinerja: 0,04%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional (target kinerja 0,05% dengan realisasi 0,01% dan tingkat capaian 20%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis (target kinerja 0,16% dengan realisasi 0,02% sehingga tingkat capainnya 12,5%); dan Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi (target kinerja 0,16% dengan realisasi 0,13% sehingga tingkat capainnya 81,25%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan meliputi : Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tekhnis (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi

Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum) dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional; Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi; Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis telah dilakukan 4 kali pelaksanaan yaitu Diklat Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik, Diklat PBJ Tingkat Dasar Model Blended Learning, Diklat Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masing-masing Sedangkan dengan peserta sebanyak 30 orang, dan Diklat Digital Talent Scholarship (DTS) dengan peserta sebanyak 230 orang.

Sedangkan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional telah dilaksanakan sebanyak 9 kali yaitu Latsar CPNS Provinsi untuk 180 orang, Latsar Kab/Kota Kontribusi untuk 309 orang, Latsar Pola Kerjasama untuk 2255 orang, Diklat PKA Kab/Kota, Bimtek Lurah untuk 30 orang lurah, Uji Sertifikasi Kompetensi Pol PP untuk 44 orang, Uji Sertifikasi PBJ Tingkat Dasar untuk 41 ASN, Uji Sertifikasi Kompetensi Jafung Lingkungan Hidup untuk 31

Jafung, Uji Sertifikasi Kompetensi Arsiparis untuk 40 ASN dan Orasi ilmiah widyaiswara.

9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,23 poin dan realisasi sebesar 3,70 poin atau tingkat capaian 87,47%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk dengan target 98,7% dan realisasi sebesar 107,88% atau tingkat capaian 109,30%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional, dan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi. Indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan pendaftaran kependudukan dengan baik. Target pelaksanaan kegiatan ini adalah 10 kabupaten/kota dan sudah terealisasi di semua kabupaten/kota se NTB. Kegiatan selanjutnya yaitu Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk, dan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk. Indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu Jumlah kegiatan pendukung penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan sudah terealisasi sebanyak 2 kegiatan.
- b. Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil. Target untuk program ini sebesar 100% dan sudah terlaksana semua. Kegiatan untuk mendukung program ini Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil. Jumlah dan jenis dokumen catatan sipil dan pendukungnya yang telah terbentuk sebanyak 1 dokumen.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota dengan target dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan yaitu Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Koordinasi Berkala antar Lembaga

- Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi. Kegiatan selanjutnya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan realisasi 59%. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
- d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan lingkaran hutan dan pesisir. Target untuk Program ini sebesar 15% dengan realisasi 17,85% atau tingkat capaian 119%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi dengan realisasi sebanyak 1 kali. Kegiatan ini didukung melalui Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang telah dilaksanakan melalui Bimtek pengembangan kawasan perdesaan untuk 40 orang.
 - e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik dengan target 60% dan realisasi 100% atau tingkat capaian sebesar 166,67%. Capaian kinerja 100%, yang artinya seluruh perangkat daerah lingkup provinsi NTB sudah memanfaatkan media informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik yang tersedia. Realisasi untuk kegiatan ini sebesar 79,53% yang didukung melalui sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
 - f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK dengan target 45% dan realisasi 61,76% atau tingkat capaian 137,24%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-government terealisasi 2 dokumen, Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data sebanyak 40 Perangkat Daerah, Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi sebanyak 18 Perangkat Daerah dan Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebanyak 1 aplikasi.

- g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi dengan target 20% dan realisasi 98,74% atau tingkat capaian sebesar 493,70%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektorial; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektorial; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah).

Persentase Data yang Tervalidasi sebanyak 100% dari target 30% terdiri dari Jumlah Jenis Data yang Tersedia 520 jenis, Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman 60 orang, Jumlah Metadata yang terbangun 61 jenis, Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 39 Perangkat Daerah, dan Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Rekomendasi Statistik sebanyak 46 Perangkat Daerah.

- h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah dengan target 30% dan realisasi 32,61% atau tingkat capaian sebesar 108,70%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).

Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi sebanyak 2 dokumen, yang terdiri dari Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber sebanyak 4 orang, Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah sebanyak 10 insiden, Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebanyak 15 Perangkat Daerah.

- i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja dengan target 63% dan realisasi sebesar 63% atau tingkat capaian 100%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan target kinerja 100% dan realisasi sebesar 100%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
Berdasarkan data dari data indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Perpustakaan Nasional R.I, Target capaian sasaran strategis Meningkatkan Literasi Membaca Masyarakat adalah 13,95 dengan satuan Nilai dan realisasi nilai indeks 17,66.
- k. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR Dan Naskah Kuno Milik Daerah dengan target capaian 100% dan realisasi sebesar 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah pengelolaan karya cetak karya rekam yang terealisasi sebanyak 500 judul. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kegiatan kedua yaitu Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi yang terealisasi sebanyak 750 eksemplar. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah). Kegiatan ketiga yaitu Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi dengan sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.
- l. Program pelayanan Penghubung pada Badan Penghubung Daerah dengan indikator kinerja angka kunjungan wisatawan pada anjungan NTB TMII dengan target sebesar 39.000 orang dan realisasi kunjungan wisatawan sebesar 4.827 orang atau dengan tingkat capaian sebesar 12%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melalui kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam); Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah (sub kegiatan : Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah); Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan).

Adapun beberapa Event penyebaran informasi dan promosi potensi daerah Nusa Tenggara Barat di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 untuk pencapaian target tersebut adalah Ikut serta dalam memeriahka ultah RI yang ke 76 "Parade Nusantara Provinsi NTB", Pentas seni Promosi Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pentas seni dan Budaya salam manis di TVRI.

10. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan target sebesar 66,78 tahun dengan realisasi sebesar 66,69 tahun atau tingkat capaian sebesar 99,86%. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (target capaian: 85%), Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (target capaian: 97%); Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar(target capaian: 65%); Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB(target capaian: 100%); Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (target capaian: 80% dengan realisasi sebesar 80 %); Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (target capaian: 94%); dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan); Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) dan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan) ; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target sebesar 2% dan realisasi 11,4% atau tingkat capaian sebesar 570%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dengan realisasi sebesar 11 dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB. Kegiatan ini dilakukan di 10 kabupaten/kota di NTB dengan didukung oleh sub kegiatan pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan selanjutnya yaitu Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan realisasi 3978 SDM kesehatan yang sudah ditingkatkan kompetensinya. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat dengan target capaian sebesar 90% dan realisasi sebesar 100% atau tingkat capaian 111,11%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dengan capaian 111,11% (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK); dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dengan capaian 111,11% (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional). Lokasi pelaksanaan kegiatan ini tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
- d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target dengan capaian 80,59% dari target 83%, sehingga tingkat capainnya 97,10%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan capaian 6 jenis sarpras yang tersedia dari target 7 jenis dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan capaian 155.949 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari target 126.098 orang.
- e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target dengan capaian 81,82% dari target 73,81%, sehingga tingkat capainnya 110,85%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya). Kegiatan kedua yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan). Standar Pelayanan Minimal mewajibkan Rumah Sakit untuk melaporkan segala bentuk

aktivitas pelayanan di Rumah Sakit melalui pengukuran 16 jenis pelayanan baik pelayanan, sarana dan prasarana, administrasi, maupun SDM itu sendiri. Jenis - jenis pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang minimal wajib disediakan meliputi : Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat Psikiatrik Dan Umum, Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas), Pelayanan Rehabilitasi Psikososial, Pelayanan Detoksifikasi Dan Rehabilitasi NAPZA, PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit), Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Non Medik dan Pelayanan Administrasi Manajemen. Seluruh jenis pelayanan ini kemudian diuraikan lagi menjadi 88 indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Dari 88 indikator Standar Pelayanan Minimal, capaian SPM yang memenuhi standar (Tercapai) adalah 72 indikator atau 81,82%, yang belum memenuhi standar (Belum Tercapai) adalah 13 indikator atau 14,77% dan yang Tidak Terukur adalah 3 Indikator atau 3,41 %.

Indikator yang belum memenuhi standar (Belum Tercapai) sebanyak 13 indikator atau 14,77%. Tidak tercapainya target ini secara umum disebabkan karena beberapa hal seperti : kesalahan dalam kamus indikator sehingga tidak sesuai dengan data yang ada, kepatuhan pengumpul data dalam pencatatan dan pelaporan yang belum tepat waktu, tim SPM yang belum secara benar dan tepat waktu mengumpulkan data yang dibutuhkan dan melakukan analisa, pemahaman terhadap kamus indikator, adanya mutasi pengumpul data di unit layanan, keterbatasan ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pengumpul data. Hal ini dapat mempengaruhi pencapaian indikator SPM dimaksud. Sedangkan 3 indikator (3,41%) yang tidak terukur didapat karena adanya ketidaksesuaian dalam kamus indikator, sehingga mempersulit pengumpul data melakukan pencatatan dan pelaporan.

- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 83% dengan realisasi 80,59% atau tingkat capaian sebesar 97,10%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan); dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit).

Sepanjang tahun 2021, jumlah alat kedokteran yang tersedia sebanyak 99 alat, dan jenis obat dan BMHP yang tersedia sebanyak 12 jenis. Selain itu, jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Manambai sebanyak 114 orang dengan pendapatan BLUD-nya sudah mencapai target.

11. **Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting dengan target kinerja sebesar 31,49% dan realisasi sebesar 19,23% atau tingkat capaian 138,93%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase balita Wasting dengan target capaian sebesar 12,41% dan realisasi 5,59% atau tingkat capaian sebesar 45,04%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas dengan target capaian sebesar 50% dan realisasi 60% atau tingkat capaian sebesar 120%. Program ini didukung melalui 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan germas. Realisasi untuk kegiatan ini adalah 60% dari target 60% dengan didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan kedua yaitu Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan. Realisasi untuk kegiatan ini sebesar 4 jenis saluran media dari target 4 jenis dengan didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Kegiatan ketiga yaitu Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM).
12. **Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan** dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target sebesar 13,68 Tahun dengan realisasi 13,9 Tahun atau tingkat capaian sebesar 101,61%) ; dan Rata rata Lama Sekolah (Target sebesar 7,01 Tahun dengan realisasi sebesar 7,38 Tahun atau tingkat capaian sebesar 105,28%). Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 99.15 % realisasi 106,63%); Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 93,408 % dengan realisasi 96,65%); Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (Target kinerja : 96.68%); Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (Target kinerja : 69,4% dengan

realisasi 85,57%); Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Target kinerja : 1,01% dengan realisasi 1,01%); Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah (Target kinerja : 1:18 dengan realisasi 1:11); dan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB (Target kinerja : 1:8 dengan realisasi 1:5). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (sub kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Penambahan Ruang Kelas Baru; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Asrama Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (sub kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus).

- b. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kurikulum (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan realisasi 9,09% dari target 20%. Sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah; dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.

- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan realisasi 50% dari target 100%; Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 99.55%); Persentase Kepala Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 70%); Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 50%); Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) (Target kinerja : 5,5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Pada tahun 2021, Persentase Kepala Sekolah SMA yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakap) terealisasi 50%, Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakap) terealisasi 50%, Persentase Pengawas SMA bersertifikat Calon Pengawas (Cawas) terealisasi 100%, Persentase Guru SMA yang berijazah minimal SI/ DIV terealisasi 97,55%, Persentase Guru SLB yang berijazah minimal SI/ DIV terealisasi 90,87%, Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakap) terealisasi 50%.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat); Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan. Realisasi program ini sebesar 33,33% dari target 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran,

Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

Pada tahun 2021 target 15 pemuda berprestasi tidak tercapai dikarenakan adanya pengalihan anggaran utk penanganan wabah COVID 19.

- g. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (sub kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi; dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event); Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (sub kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)); dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (sub kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan). Pada tahun 2021 target pembinaan atlet berprestasi tidak tercapai dikarenakan adanya pengalihan anggaran utk penanganan wabah COVID 19. Anggaran pada OPD sebagian dialokasikan untuk penanggulangan bencana sehingga pembinaan atlet melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

13. Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air ,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Targte masing-masing indikator tersebut adalah sebesar 42,83 poin; 87,53 poin; dan 70,29 poin dengan capaian masing-masing indikator secara berturut-turut adalah sebesar 45,10 poin; 88,52 poin dan 80,22 poin. Dengan kata lain seluruh indikator tersebut sudah memenuhi target yang diharapkan. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan dengan Target kinerja

sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi; dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (sub kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup).

Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun sebanyak 2 orang, Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi sebanyak 10 dokumen yang terdiri dari Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi sebanyak 3 dokumen dan Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi sebanyak 7 dokumen.

- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya dengan Target kinerja sebesar 10 lokasi dan realisasi capaian sudah 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi); Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan (sub kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat).

Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup sebanyak 800 titik, Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan sebanyak 65 parameter, dan Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi sebanyak 10 lokasi.

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase taman kehati yang terkelola dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Realisasi Pembentukan Taman Kehati sebagai salah satu bentuk Taman Asri terhambat karena keterbatasan anggaran.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, telah teridentifikasi 2 (dua) calon lokasi pembangunan Taman Kehati yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dengan indikator Kinerja Persentase unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi 93,33% atau tingkat capaian sebesar 116,66%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan Limbah B3 adalah sebanyak 28 unit usaha.

- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan dengan target kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 44,23% atau tingkat capaian sebesar 44,23%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi sebanyak 152 usaha/kegiatan yang terdiri dari jumlah usaha/kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya sebanyak 38 usaha/kegiatan dan Jumlah usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi sebanyak 152 usaha/kegiatan.

- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional dengan Target kinerja sebesar 10% dan realisasi sebesar 3,75%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 80 sekolah.

- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan persentase pengaduan yang terselesaikan dengan target kinerja masing-masing sebesar 20% dan 100%. Capaian kinerja masing-masing indikator sebesar 18% (tingkat capaian 90%) dan 100% (tingkat capaian 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani sebanyak 18 pengaduan, yang terdiri dari Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani sebanyak 16 pengaduan dan Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi sebanyak 2 pengaduan/kasus.

14. Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target 67,7 poin dan realisasi kinerja sebesar 65,59 poin atau tingkat capaian sebesar 96,88%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi (Target kinerja : 66,74% dengan realisasi sebesar 39,45% atau tingkat capaian sebesar 59,11%) dan Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja sebesar 10% dan realisasi 8,67% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,70%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan) ; Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan

Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).

Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan sebanyak 48 Km, Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun sebanyak 7 dokumen, Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia sebanyak 1 dokumen, Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak sebanyak 10 unit, dan Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi sebanyak 19 industri.

- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (Target kinerja sebesar 30503.3 Ha dengan realisasi 35.002 Ha atau tingkat capaian kinerja sebesar 114,75%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (sub kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi; Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi; Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi; Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi; Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi; dan Perencanaan Pengelolaan TAHURA); Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES); Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi).

Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola sebanyak 1 unit; Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan seanyak 24 penangkar; Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola sebanyak 8 kelompok.

- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase KTH yang meningkat kelasnya dengan target kinerja sebesar 4,95% dan realisasi 13,29% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 268,44%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; dan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.

Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya sebanyak 30 kelompok yang terdiri dari jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 73 orang, Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya sebanyak 5 kelompok, jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 131 kelompok.

- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas dengan target kinerja sebesar 8 DAS dan realisasi 5 DAS sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 62,5%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS; Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS; dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS.

Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya sebanyak 5 DAS yang terdiri dari jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan sebanyak 1 lembaga, dan Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat sebanyak 270 unit.

- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Target kinerja 89,07%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang).

15. **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan** dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Target kinerja masing-masing indikator sebesar 50% dan 20%. Realisasi secara berturut-turut sebesar 39,68% dan 9,34% sehingga tingkat capaian kinerja untuk kedua indikator masih belum mencapai target yaitu 79,36% dan 46,70%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengelolaan sampah dengan Target sebesar 70 %

dan realisasi 49,02% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 70,03%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan sub kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional; dan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional).

Sampai akhir Desember 2021, persentase penanganan sampah terhitung sebesar 39,68% melalui perhitungan jumlah sampah yang masuk dan ditangani di 8 unit TPA dan 1 unit TPA Regional di kab/kota se-NTB. Rata-rata jumlah sampah yang masuk ke TPA di seluruh kab/kota se-NTB adalah sebesar 1.046,59 ton/hari dari proyeksi total sampah harian sebesar 2.637,76 ton/hari.

Tahun 2021 persentase pengurangan sampah mencapai 9,34% atau meningkat 2,15 poin dari tahun sebelumnya. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana prasarana antara lain lubang biopori sumur biopori, komposter bag, TPS3r, BSF Mandiri, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi.

Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi dengan baik sebanyak 1 unit, Jumlah industri Pengolahan sampah dan limbah B3 yang beroperasi sebanyak 1 unit, Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional sebanyak 1 unit, dan Kerjasama pengolahan sampah sebanyak 16 kerjasama.

16. Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi dengan target kinerja sebesar 13.362 Milyar Rupiah dan realisasi 14.879,27 Milyar rupiah sehingga tingkat capaiannya sebesar 111,36%. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investor (Target kinerja : 100 %). Untuk mendukung program ini dilakukan 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan realisasi 2 dokumen. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman. Kegiatan kedua yaitu Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan realisasi sebanyak 2 dokumen, Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi.

- b. Program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal. Target kinerja sebesar 40% dengan realisasi 72% sehingga tingkat capaiannya 180%. Program ini didukung dengan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi; dan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi. Kegiatan ini sudah terealisasi sebanyak 2 dokumen sepanjang tahun 2021.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Target kinerja : 87 %). Adapun kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 4 poin. Kegiatan pertama yaitu Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota dengan realisasi 24 izin yang diterbitkan dari target 4 izin. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kegiatan kedua yaitu Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi. Realisasi untuk kegiatan ini sebanyak 3.596 dari 3.500 izin dan non izin yang dikeluarkan. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah (Target kinerja: 50 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan didukung 3 sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 798 jumlah perusahaan yang menyampaikn LKPM dari target 500 perusahaan.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini

sudah terealisasi sebanyak 2 dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMTSP. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

17. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan dengan target sebesar 29,01% dan realisasi 43,44% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 149,74%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak dengan target kinerja 9 % dan realisasi 6% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 66,67%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (sub kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).

Realisasi Populasi Ternak Tahun 2021 yaitu komoditas sapi sebanyak 1.320.551 ekor, kerbau 120.110 ekor, kambing 641.186 ekor dan unggas 24.727.499 ekor. Sub Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Sikomandan yang telah berjalan sejak tahun 2020 untuk meningkatkan populasi ternak secara optimal melalui teknologi inseminasi buatan. Kegiatan Sikomandan juga didukung oleh kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan di wilayah sumber bibit (wilsumbit) yang berlokasi di

Kabupaten Lombok Tengah, yang dipusatkan di 7 wilayah kecamatan, yaitu Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Praya, Praya Tengah, Jonggat, dan Pringgarata.

- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 76%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak).

Sumber bibit (wilsumbit) berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, yang dipusatkan di 7 wilayah kecamatan, yaitu Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Praya, Praya Tengah, Jonggat, dan Pringgarata.

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS dengan target kinerja <1% dan realisasi sebesar 0,06 % sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (sub kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya).

Penyakit yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah penyakit Rabies (RA), Anthrax (AT), Brucellosis (BRUC), Avian Influenza (AI), Hog Cholera (HC), Septichaemia Epizootica (SE), Surra (SA), Helminthiasis (Hel), dll karena masuk dalam 22 jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian 4026 tahun 2013.

Kasus Rabies dilaporkan sebanyak 246 kasus (Kab. Sumbawa 406 kasus, Kab. Dompu 2 kasus, Kab. Bima 17 kasus dan Kota Bima 1 kasus), Anthrax 4 kasus (Kabupaten Sumbawa 3 kasus dan Kab. Dompu 1 kasus), SE/Ngorok 127 kasus (Kab. Sumbawa 71 kasus dan Kab. Bima 53 kasus), surra 13 kasus (Kab. Lombok Tengah 1 kasus dan Kab. Sumbawa 12 kasus), AI 1 kasus di Kota Mataram). Demikian halnya dengan Penyakit Helminthiasis (7.585 kasus) terjadi di 9 kabupaten/kota kecuali di Kab. Dompu, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan kasus helmintiasis melalui Ishiknas oleh Kab. Dompu.

- d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja 83% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 83%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani; Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani).

Kegiatan pembinaan/pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan Tahun 2021 dilaksanakan pada 2 kelompok ternak yang sudah bentuk korporasi yakni di KTT Ridho Ilahi dan Korporasi Mandalika Baren Sampi. Adapun kegiatannya adalah Pertemuan unit manajemen kawasan korporasi/UMKM yang dilaksanakan di Bank Pakan KTT Bumbung Wetan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang, Pertemuan unit manajemen kawasan korporasi/UMKM yang dilaksanakan di Desa Pengingat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta 50 orang.

- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian dengan target kinerja sebesar 11,51%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu,

Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).

Pembangunan kandang unggas sebanyak 10 unit; pengadaan ternak ayam, pakan dan kandang telah dilakukan terhadap 109 kelompok; pengadaan ternak ayam telah dilakukan terhadap 35 kelompok, Pengembangan/Pengadaan ternak itik telah dilakukan terhadap 110 kelompok.

- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian dengan target kinerja sebesar 34% dan realisasi 58% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 170,59% serta indikator dan Pengembangan Fasilitas Industrialisasi Pertanian dengan target dan capaian 2 unit/paket. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.

Jumlah Prasarana Pertanian Yang dibangun/direhabilitasi/dilengkapi fasilitasnya sebanyak 339 paket/unit yang terdiri dari Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibuat/dibangun sebanyak 241 paket, Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun sebanyak 58 paket, Jumlah Embung Rakyat Yang Dibuat/dibangun sebanyak 38 paket, Jumlah Unit prasarana industrialisasi pertanian yang diadakan / dilengkapi fasilitasnya sebanyak 2 unit.

- g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI dengan target kinerja sebesar 95,55% dan realisasi 96,99% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,56%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsid dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Persentase Luas Serangan OPT yang dapat dikendalikan sebanyak 2,38% sedangkan Persentase Luas DPI yang dapat dikendalikan (Banjir, Kekeringan dan Faktor lainnya) sebanyak 0,63%. Untuk Jumlah Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Yang Mengikuti Bimbingan teknis sebanyak 20 orang.
- h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok dengan target kinerja sebesar 5% dan realisasi 10% sehingga tingkat capaiannya sebesar 200%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama

Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).

Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (ASN/THL dan Swadaya/Swasta) Yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 340 orang yang terdiri dari Jumlah penyuluh ASN/THL yang dilatih sebanyak 310 orang dan Jumlah penyuluh Swadaya/Swasta yang dilatih sebanyak 30 orang.

Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan dan Jumlah petani yang dilatih sebanyak 240 orang.

- i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang dikelola dengan target kinerja sebesar 10% dan realisasi 8,672% sehingga tingkat capaiannya sebesar 86,72%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi

Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).

Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan sebanyak 48 Km, Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun sebanyak 100%, Jumlah data dan Informasi pemanfaatan

kawasan hutan yang tersedia sebanyak 1 dokumen, Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak sebanyak 10 unit, Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi sebanyak 19 industri, dan luas lahan kritis yang direhabilitasi sebanyak 2.824 Ha.

Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 501.178 Ha atau sekitar 25,49% dari luas wilayahnya. Pada tahun 2021, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilakukan melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 32.444 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Dengan asumsi keberhasilan tumbuh tanaman sebesar 75%, maka yang diperkirakan akan terus hidup ialah seluas 24.333 ha, sehingga dapat menurunkan lahan kritis sebesar 4,81% dari luas lahan kritis eksisting. Selain itu, rehabilitasi secara sipil teknis dilakukan melalui pembangunan 270 unit bangunan Gully Plug yang tersebar di 4 (empat) Balai KPH di Pulau Sumbawa.

- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan target kinerja sebesar 8,53% dan realisasi 101,33% sehingga tingkat capaiannya sebesar 1187,92%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi); dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).

Luas wilayah lautan Provinsi NTB adalah 29.159,04 km² dengan wilayah pesisir sebanyak 326 Desa/Kelurahan, dan Non Pesisir sebanyak 815 Desa.

- k. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Termasuk di dalamnya Industri Perikanan berupa Garam, Tepung Ikan, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil.

Pada Tahun 2021 produksi garam NT sebanyak 108.803,66 Ton. Terdapat 6 kelompok petambak garam yang diberikan pembinaan dan sarana prasarana

usaha garam antara lain : Kelompok So Ompu Hima Kab. Bima berupa rumah tunnel garam, Kelompok Nanga Bangka Kab Sumbawa berupa rumah tunnel garam, Kelompok Koperasi Syariah Bina Laut Kab. Lombok Barat. berupa Pembangunan, Gudang Garam ukuran 1.000 ton, Kelompok Bertong Bangkit Kab Lobar, berupa revitalisasi gudang garam rakyat ukuran <100 ton, Kelompok Nanga Bangka Kab Sumbawa berupa integrasi pergaraman 8-15 Ha, dan Kelompok So Lato Palina'e Kab. Bima berupa integrasi pergaraman 8-15 Ha.

Pada tahun 2021 luas lahan potensial untuk Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di NTB seluas 3.725 Ha, yang sudah dimanfaatkan seluas 2.331 Ha yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah kelompok usaha garam rakyat sampai dengan tahun 2021 sebanyak \pm 578 kelompok dengan jumlah anggota \pm 5.263 orang.

Produksi tepung ikan di NTB sebesar 30 ton yang sebagian besar dihasilkan oleh UD. ST. Fish dan beberapa pembudidaya ikan yang tersebar di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram. Telah dilaksanakan bimtek pengolahan tepung ikan bagi 30 kelompok pembudidaya ikan yang melakukan pembuatan pakan mandiri berbahan baku tepung ikan di lokasi usaha ST. Fish di desa Meninting Lombok Barat melalui dana Bagi Hasil.

- I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap dengan target kinerja sebesar 241.843 Ton dan realisasi sebesar 239.954 ton sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,22%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah

Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).

Rencana Alokasi Ruang Laut Sesuai yang tercantum dalam Dokumen RZWP3K Provinsi NTB untuk zona perikanan tangkap seluas 2.384.459,59 Ha. Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun sebanyak 75 izin; Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun sebanyak 770 buah, Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun 770 kapal; Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebanyak 75 kapal.

- m. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dengan target kinerja sebesar 1.195.104 Ton dan realisasi sebesar 935.522 ton sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 78,28%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber

Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).

Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun sebanyak 101 pelaku usaha sedangkan Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun sebanyak 101 pelaku usaha.

Perikanan budidaya juga melaksanakan program unggulan yaitu Budidaya Lobster dimana pada tahun 2021 produksi Lobster mencatat angka produksi sebesar 137,72 ton yang berasal dari 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur.

- n. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,91%) dan Persentase penurunan pelanggaran tindak pidana sektor kelautan dan perikanan dengan target kinerja sebesar 10% dan realisasi sebesar 22% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 220%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil)
- o. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan dengan target kinerja sebesar 213.130 Ton dan realisasi sebesar 214.698 ton sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,74%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

(Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).
Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan sebanyak 6 izin SIUP.

18.Sasaran Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin

dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.
Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Target capaian untuk indikator ini sebesar 75% dengan realisasi 99,33% atau tingkat capaian 132,44%. Program ini didukung melalui 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, dan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan. Kegiatan kedua yaitu penyediaan layana kesehatan untuk KP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. Realisasi kegiatan ini sudah 100% dengan didukung oleh sub kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengeloaan Kesehatan Lingkungan; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten / Kota; operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; dan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan. Kegiatan ketiga yaitu Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah yang sudah terealisasi sesuai target sebanyak 1 dokumen. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja umlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit. Kegiatan ini sudah terealisasi sesuai target sebanyak 1 dokumen dengan didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Target kinerja : 2,5 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar); Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (sub kegiatan : Pengasuhan; Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar ; Anak Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang mudah Diakses; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemulasaraan); Rehabilitasi

Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; emberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA).

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti realisasi 100 jiwa, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sebanyak 230 jiwa, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sebanyak 130 jiwa, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sebanyak 75 jiwa.

- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan dan Perlindungan Korban Bancana, Bantuan Kebencanaan, Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang meningkat kemampuannya melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, Korban bencana alam yang mendapat layanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang ditingkatkan SDM dan kesejahteraannya, Korban bencana alam penerima bantuan logistic Masyarakat yang menerima bantuan air bersih, SDM petugaspending PKH yang ditingkatkan kompetensinya, dan Pertemuan petugas pendamping dan operator PKH.

19.Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target kinerja sebesar 86,20% dan realisasi sebesar 90,40% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,87%. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Lumbung

Pangan yang termanfaatkan dengan target kinerja sebesar 71,97% dan realisasi sebesar 89,30% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 124,08%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur; dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

Target lumbung pangan yang dibangun Tahun 2021 adalah sebanyak 2 unit, namun adanya refocusing anggaran di tahun 2021 menyebabkan kegiatan ini tidak dapat direalisasikan. Meski tidak ada lumbung pangan yang dibangun di tahun 2021, Tingkat partisipasi anggota dalam pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat sudah memenuhi target sebesar 30%.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Program ini didukung dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Indikator kinerja untuk program ini adalah Tingkat akurasi data laporan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan dengan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan. Kegiatan kedua yaitu Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan indikator kinerja kadar air maksimal cadangan pangan pemerintah. Realisasi untuk kegiatan ini adalah 14% dengan didukung oleh sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Kegiatan ketiga yaitu Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi. Indikator kinerja untuk program ini adalah tingkat konsumsi energi dengan realisasi 2442 Kkal/kapita/hari dari target 2486,1 Kkal/kapita/hari. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA).
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dengan target kinerja sebesar 5,77% dan realisasi sebesar 2,97% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 51,47%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan sub

kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; dan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi.

Pada tahun 2021 telah disalurkan bantuan untuk membantu 500 keluarga yang memiliki balita yang terkategori gizi kurang pada seluruh kabupaten/kota se NTB dengan rincian: Kota Mataram 55 paket, Lombok Barat 100 paket, Lombok Utara 75 paket, Lombok Tengah 100 paket dan Lombok Timur 170 paket.

Jenis Makanan Bantuan Penanganan Kerawanan Pangan pada Balita Kurang Gizi Tahun 2021 adalah telur ayam ras 10.000 butir, Abon Daging Sapi berat 170 gram sebanyak 500 bungkus, Kacang Hijau Kering Butiran Kilat sebanyak 500 kg, Gula Pasir Kasar 500 kg, Minyak Goreng kemasan pabrikan 1.000 liter, Susu Balita berat 180 gram sebanyak 500 bungkus, dan Tas Kantong Bahan Vinyl desain sebanyak 500 buah.

- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 125%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi; Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan).

Kegiatan Tingkat akurasi pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terealisasi sebesar 100% dengan didukung oleh Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan PSAT sebanyak 50 orang, Jumlah Komoditi PSAT yang disertifikasi dan diawasi sebanyak 52 sertifikat, Frekwensi Bimwas Keamanan PSAT sebanyak 4 kali, dan Jumlah PSAT yang diuji sebanyak 20 komoditi.

20. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum dengan target kinerja sebesar 76,48% dan realisasi sebesar 78,76% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 102,98%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Cakupan air minum dengan target kinerja sebesar 76,48% dan realisasi sebesar 78,76% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 102,98%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

Teknis SPAM; dan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan. Pada tahun 2021, jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun sebanyak 240 KK.

21. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan target kinerja sebesar 80,10% dan realisasi sebesar 87,78% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 109,59%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar. Realisasi program ini sebesar 74,5% dari target 75% sehingga tingkat capaiannya sebesar 99,33%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luasan Prasarana dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 85% dan realisasi sebesar 95,31% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 112,13%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

Pada tahun 2021 Luasan prasarana dalam kondisi baik di Nusa Tenggara Barat ditargetkan sebesar 85 Ha atau dengan kata lain 1600 paket peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan, dan pada akhir Tahun Anggaran 2021 yang telah selesai dikerjakan dengan capaian sebesar 95,31 Ha atau dengan kata lain 1055 paket peningkatan jalan lingkungan pada Kabupaten/Kota se-NTB.

22. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi dengan target kinerja sebesar 99,77% dan realisasi sebesar 99,98% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 100,21%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik dengan target kinerja sebesar 5,96% dan realisasi sebesar 6,7% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 112,42%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar

lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi ; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).

Meningkatnya capaian kinerja diperoleh dari meningkatnya jumlah kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan. Jumlah total kapasitas pembangkit sebesar 642,77 MW dimana 43,09 MW diantaranya berasal dari pembangkit EBT. Sedangkan untuk total bauran energi sampai Desember belum tersedia datanya, namun demikian terjadi peningkatan realisasi bauran energi tahun 2019 sebesar 9,18% dari target 13,07% dan realisasi tahun 2020 sebesar 11,29% dari target 14,17%. Harapannya bauran energi akan terus meningkat walaupun belum sesuai target yang diharapkan. Butuh kebijakan yang lebih konkrit dari seluruh stakeholder baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan melaksanakan peningkatan bauran energi 23% pada tahun 2025.

- b.** Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dengan target kinerja sebesar 99,77% dan realisasi sebesar 99,98% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,21%. Indikator kedua yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga) dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dengan target kinerja sebesar 800 rumah tangga dan realisasi sebesar 700 Rumah Tangga sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 87,50%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan

Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan).

Tercapainya target kinerja rasio elektrifikasi pada tahun 2021 banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdiri dari :

- Adanya program Pemerintah Pusat terkait penyediaan tenaga listrik 35.000 MW, dimana sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Pusat melalui PLN menargetkan adanya tambahan daya listrik 280 MW yang terdiri dari 150 MW di Pulau Lombok dan 130 MW di Pulau Sumbawa.
- Adanya penambahan jaringan listrik sampai dengan tahun 2020 menjadi 797,78 kms SUTT 150 KV;
- Rasio Desa Berlistrik di Provinsi NTB sudah mencapai 100% dari 1.140 desa/kelurahan yang ada di NTB dimana 5 Desa diantaranya masih bersumber dari Non PLN. Ke-5 desa tersebut terdiri dari : Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa; Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; Desa Tangkam Pulit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa; Ke-4 Desa tersebut telah direncanakan masuk jaringan PLN pada tahun 2023. Desa Bao Desa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa yang direncanakan akan masuk jaringan listrik PLN pada tahun 2024. Namun demikian masuknya jaringan PLN tergantung adari kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah tersebut.
- Pada akhir tahun neraca daya Provinsi NTB sebaik baik dengan Daya Mampu sebesar 483,58 MW, Beban Puncak sebesar 404,10 MW dengan cadangan sebesar 79,48 MW.
- Dari sisi pembangkit PLN, semakin meningkat porsi pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan. Bauran energi akumulatif dari pembangkit PLN terdiri dari 2,05% dari energi air, Refused Derived Fuel (RDF/Sampah) 0,06%, Energi Surya 2,03%, Batubara 31,24%, High Speed Diesel (HSD) 34,70%, Biosolar 11,77% dan Marine Fuel Oil (MFO) 18,21%.
- Total pembangkit PLN yang bersumber dari energi terbarukan sampai dengan 2021 sebesar 39,19 MW yang terdiri dari ttal EBT PLN sebesar 2,84 MW, Independent Power Producer (IPP) Hydro sebesar 15,75 MW dan IPP PLTS sebesar 21,6 MW.
- Saat ini masih ada 6 sistem isolated PLN (tidak on grid) yaitu Pulau Medang Kabupaten Sumbawa (operasi 12 jam/hari); Labuan Aji Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa (operasi 12 jam/hari); Sebotok Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa (operasi 12 jam/hari); Bajo Pulau Kabupaten Bima (operasi 12 jam/hari); Lunyuk (operasi 24 jam/hari) dan Pekat Kabupaten Dompu (operasi 24 jam/hari).

23. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) dengan target kinerja sebesar 62,65% dan realisasi sebesar 63,47% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 101,31%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan 2 indikator Kinerja yaitu Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi; dan Rumah tangga yang menempati hunian layak. Target masing-masing indikator yaitu 100% dan 62,65%. Realisasi kinerja secara berturut-turut sebesar 63,47% (tingkat capaian kinerja sebesar 63,47%) dan 63,57% (tingkat capaian kinerja sebesar 64,34%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi); Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP); dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana).

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dilakukan dengan pola peningkatan kualitas dan pola pembangunan baru. Realisasi penanganan pada akhir Tahun 2021 sebanyak 63,51 % atau dengan kata lain 199 unit yang terdiri atas 143 unit peningkatan kualitas dan 55 unit pembangunan baru dan 1 Homestay.

24. Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dengan Indikator Kinerja Inflasi dengan target kinerja sebesar 3-4% dan realisasi sebesar 2,12% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 129,33%. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting dengan target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 60% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor (sub kegiatan : Fasilitas pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya,

dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya; dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya); Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana) (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA).

Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor sebanyak 5 pertimbangan teknis, Jumlah Distributor Minuman Beralkohol (MB) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebanyak 3 distributor, Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor sebanyak 3 pertimbangan teknis, Jumlah Pengecer Bahan Berbahaya (B2) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebanyak 4 orang, Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali sebanyak 4 usaha, Jumlah Toko Sarana Distribusi Bahan Berbahaya yang Diperiksa sebanyak 4 toko dan jumlah pengawasan sebanyak 4 pengawasan.

- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dengan target kinerja sebesar 4% dan realisasi sebesar 3,88% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 97%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor); Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi); Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida;Pemeriksaan Dokumen Perizinan

Kegiatan Distribusi; Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi; dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi).

Selama tahun 2021 Dinas Perdagangan menyelenggarakan pasar murah selama 1 (satu) Bulan yaitu dari tanggal 5 April s/d 5 Mei 2021 melalui dana APBD Provinsi NTB yang dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB, sedangkan untuk pelaksanaan pasar murah yang bersumber dari dana APBN/Dekonsentrasi sebanyak 5 (lima) kali yang dilaksanakan di Pulau Lombok yaitu pada tanggal 15 April 2021, 21 April 2021, 18 Oktober 2021, 25 Oktober 2021 dan 8 November 2021.

Adapun komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang menjadi target pengukuran indikator stabilitas harga adalah 22 (Duapuluh dua) komoditi barang kebutuhan pokok yaitu : Beras, Tepung Terigu, Gula Pasir, Kacang Kedelai, Minyak Goreng, Cabe Merah, Daging Sapi, Cabe Rawit, Daging Ayam, Bawang Merah, Telur, Bawang Putih, Susu Bubuk, Ikan Laut Kembang, Jagung Pipilan Kering, Ikan Asin Teri, Ikan Segar, Mie Instan Kari Ayam, Garam Beryodium, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Ketela Pohon.

- c. Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang dengan target kinerja sebesar 1% dan realisasi sebesar 1,93% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 193%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ; Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan ; Pameran Dagang Lokal; Peningkatan Citra Produk Ekspor).

Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang yang ditargetkan 4 (empat) UKM, sampai akhir tahun 2021 sudah terealisasi sejumlah 3 (tiga) UKM dan jika dipersentasekan menjadi 75,00 persen. ini berarti secara persentase sudah mencapai 75 persen dari target 100 persen. Jadi secara keseluruhan untuk Program Pengembangan Ekspor secara kinerjanya dapat dikategorikan baik. Nilai pencapaian ekspor dengan tambang maupun non tambang Nusa Tenggara Barat pada komoditi konsentrat tembaga senilai US\$ 734.533.970,35; Batu apung senilai US\$ 301.115,59; Kerajinan Buah Kering senilai US\$ 329.519,01; Mutiara senilai US\$ 5.286.079,40 dan 11 (sebelas) komoditi lainnya senilai US\$ 2.602.977,91.

- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Sengketa dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 81% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,25%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen; Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan

konsumen; Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen); Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Fasilitasi penganganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen; Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen; dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Verifikasi Mutu Produk; Pengembangan Layanan Pengujian; Pengembangan Layanan Sertifikasi; Pengembangan Layanan Kalibrasi).

Pada tataran kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator outputnya Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota yang ditargetkan 40 (empat puluh) kasus sampai akhir tahun 2021 terealisasi sejumlah 55 (lima puluh lima) kasus dan jika dipersentasekan menjadi 137,5 persen, jika dianalogikan capaian kegiatan ini melebihi dari target yang hanya 100 persen.

Sampai Akhir Tahun 2021 Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah berhasil menyelesaikan kasus pengaduan konsumen sebanyak 55 Kasus dari 40 Kasus yang difasilitasi baik oleh BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Barat, BPSK Kabupaten Lombok Utara maupun BPSK Kabupaten Sumbawa. Sejak kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai akhir tahun 2021, jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh BPSK sebanyak 164 kasus.

Untuk kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator outputnya Jumlah Komoditi Teruji yang ditargetkan sejumlah 1 (satu) komoditi, sampai akhir 2021 kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan kegiatan ini terkena rasionalisasi.

Kegiatan terakhir adalah Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator outputnya Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa yang ditargetkan sebanyak 50 (limapuluh) toko/retail, sampai akhir tahun 2021 terealisasi sejumlah 70 (tujuh puluh) toko/retail dan jika dipersentasekan menjadi 140 persen, jika dianalogikan capaian kegiatan ini melebihi dari target 100 persen.

- e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 20% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 20%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi); Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi); dan

Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan).

Pada tataran kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri dengan indikator outputnya Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi yang ditargetkan 20 (duapuluh) produk sampai akhir tahun 2021 terealisasi sejumlah 20 (dua puluh) produk.

Selanjutnya untuk kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan indikator outputnya Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan yang ditargetkan sejumlah 10 (sepuluh) jenis produk, sampai akhir 2021 kegiatan ini terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) jenis produk.

Kegiatan terakhir adalah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan indikator outputnya Jumlah UKM Terakomodir di Retail yang ditargetkan sebanyak 15 (limabelas) UKM, sampai akhir tahun 2021 terealisasi sejumlah 15 (lima belas) UKM.

Implementasi dari aspek Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri adalah melalui NTB Mall. Sampai dengan bulan oktober 2021 omset NTB mall telah mencapai Rp. 2.733.825.443,- dan hingga Nopember 2021 telah melibatkan 2.853 UMKM di NTB serta menyerap produk UKM lebih dari 4.250 produk, selain itu NTBmall juga telah melakukan fasilitasi ekspor produk ke negara Taiwan, Eropa, Timur Tengah dan Amerika.

25.Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan Indikator Kinerja Pengeluaran per Kapita dengan target kinerja sebesar 11.273,02 ribu rupiah dan realisasi sebesar 10.377 ribu rupiah sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 92,05%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; dan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

26.Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 122,71 Milyar Rupiah dan realisasi sebesar 15,2 Milyar Rupiah sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 12,39%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata Minimal Berkembang dengan target kinerja sebesar 20 destinasi dan realisasi sebesar 22 destinasi sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 110%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi); Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan destinasi pariwisata provinsi); Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata).

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi dengan indikator kinerja jumlah Kawasan pariwisata yang minimal berkembang dengan sub kegiatan pengembangan kawasan strategis pariwisata memiliki target 1 kawasan dan dalam realisasinya mencapai 3 kawasan yang telah dikembangkan, yaitu Kawasan Rasimas Sembalun (destinasi Otak Kokoq, Pesanggrahan), Kawasan Kuta Mandalika dan Kawasan Pantai Pink (Jerowaru). Kegiatan pengembangan kawasan dalam bentuk kegiatan aksi bersih kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kawasan. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi dengan indikator jumlah destinasi wisata minimal berkembang memiliki sub kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang targetnya pada tahun ini sebesar 20 desa wisata. Realisasi yang dicapai sebesar 22 desa wisata yang telah dikembangkan, yaitu Desa Wisata Rembitan (Kecamatan Pujut-Lombok Tengah), Desa Wisata Tete Batu (Kecamatan Sikur- Lombok Timur), Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Desa Wisata Senteluk (Kecamatan Gunung Sari-Lombok Barat), Desa Wisata Pungka (Kecamatan Unter Iwes, Pungka-Sumbawa), Desa Wisata D'Odeng Gubug Alang (Kecamatan Kopang-Lombok Tengah) dan Desa Wisata Tete Batu Selatan (Kecamatan Sikur-Lombok Timur, Desa Wisata Loyok (Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur) yang di intervensi langsung dalam bentuk penataan amenitas oleh dinas Pariwisata Provinsi NTB serta adanya 14 Penataan Desa Wisata yang merupakan pencapaian kinerja secara crooscatng dengan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil NTB , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan beberapa OPD terkait pengembangan Desa Wisata serta beberapa Lembaga dan Perguruan Tinggi yang ikut serta memberikan perhatian terhadap pengembangan desa wisata seperti Poltekpar Lombok, STP Mataram, dan pendampingan desa wisata oleh Badan Promosi Pariwisata daerah (BPBD) Provinsi NTB, Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) NTB. Sehingga sampai dengan saat ini, jumlah desa wisata yang berhasil dikembangkan menjadi 67 desa/kelurahan antara lain: Desa Kawinta to'I (Bima), Desa Pancasila (Dompu), Desa Pusuk Lestari (Lombok Barat), Desa

Bonjeruk (Lombok Tengah), Desa Sepakek (Lombok Tengah), Desa Aiq Berik (Lombok Tengah), Desa Sengkol (Lombok Tengah), Desa Tete Batu (Lombok Timur), Desa Sembalun Bumbung (Lombok Timur), Desa Kembang Kuning (Lombok Timur), Desa Tanjung Luar (Lombok Timur), Desa Sembalun (Lombok Timur), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Kerujuk (Lombok Utara), Desa Gili Indah (Lombok Utara), Desa Pemenang Barat (Lombok Utara), Desa Lantung (Sumbawa), Desa Lapade (Sumbawa), Desa Mantar (Sumbawa Barat), Desa Mas-Mas (Lombok Tengah), Desa Bilebante (Lombok Tengah), Desa Sesaot (Lombok Barat), Desa Buwun Mas (Lombok Barat), Desa Hu'u (Dompus), Desa Soro (Bima), Desa Risa (Bima), Desa Malaju (Dompus), Desa Nangamiro (Dompus), Desa Banyumulek (Lombok Barat), Desa Lingsar (Lombok Barat), Desa Gili Indah (Lombok Barat), Desa Mertak (Lombok Tengah), Desa Lantan (Lombok Tengah), Desa Kuta (Lombok Tengah), Desa Blebante (Lombok Tengah), Desa labuhan Pandan (Lombok Timur), Desa Sugian (Lombok Timur), Desa Senanggalih (Lombok Timur), Desa Ganggalang (Lombok Utara), Desa Labuan Aji (Sumbawa), Desa Labuan Jambu (Sumbawa), Desa Poto Tano (Sumbawa Barat), Desa Labuhan Kertasari (Sumbawa Barat), Desa beru (Sumbawa Barat), Desa Rembitan (Lombok Tengah), Desa Tete Batu (Lombok Timur), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Senteluk (Lombok Barat), Desa Pungka (Sumbawa), Desa D'Odes Gubug Alang (Lombok Tengah) dan Desa Tete Batu Selatan (Lombok Timur), Leneng Kecamatan Praya (Lombok Tengah), Kekalik Kecamatan Sekarbela (Kota Mataram), Desa Wisata Loyok (Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).

- b. Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan target kinerja sebesar 1.000.000 orang dan realisasi sebesar 964.036 orang sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 96,40%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan 141% bila di bandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 964.036 Orang yang terdiri dari 952.146 orang wisatawan nusantara dan 11.890 wisatawan mancanegara.

Pada tahun 2021 ditargetkan rata-rata lama menginap wisatawan di NTB 3,10 hari dengan capaian 2,23 hari pada hotel bintang dan 1,43 hari pada hotel non bintang atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tahun 2020 selama 1,88 hari pada hotel bintang

dan 1,32 hari pada hotel non bintang walaupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Peningkatan rata-rata lama menginap diindikasikan dengan meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) tahun 2021 untuk Hotel Bintang dengan rata-rata 33,62% dan Non Bintang 14,37% dengan jumlah tamu yang menginap mencapai 964.036 orang, sedangkan TPK tahun 2020 untuk Hotel Bintang mencapai 25,01% Sedangkan non Bintang 15.13%.

- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif dengan target kinerja sebesar 30,21% dan realisasi sebesar 30,43% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 100,72%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan sub kegiatan Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik ; Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.

Pencapaian pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki HaKI sebesar 30,43 % dari seluruh pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar atau sebanyak 163 Hak Kekayaan Intelektual. HAKI yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif adalah Hak Merk sebanyak 157 Hak Merk dan 6 Hak Kekayaan Intelektual Komunal yang terdiri dari Madu Sumbawa, Kangkung Lombok, Susu Kuda Liar, Kopi Tambora, Sate Tanjung dan Tari Rudat.

- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompeten dengan indikator Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif dengan target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 60,5% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 100,83%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kamitraan pariwisata; Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan.

Peningkatan kapasitas SDM pariwisata pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 300 orang dan terealisasi sebanyak 300 orang. Pelatihan yang pendanaannya bersumber dari DAK Non Fisik terdiri dari kegiatan pelatihan penguatan kelembagaan pokdarwis, pelatihan homestay, pelatihan digitalisasi, branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan inovasi dan hegienitas sajian kuliner, pelatihan kebersihan lingkungan sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata, pelatihan mitigasi

bencana di destinasi pariwisata serta pelatihan pengelolaan toilet di destinasi pariwisata.

Pada tahun 2021 peningkatan kapasitas pokdarwis ditargetkan sebanyak 40 pokdarwis dan terealisasi sebanyak 30 pokdarwis. Adapun 30 pokdarwis yang ikut dalam pelatihan ini adalah pokdarwis desa wisata tetebatu, tetebatu selatan, tetebatu utara, pringgasela, aikdewe, kembang kuning, kotaraja, pesanggrahan, pengadangan, loyok, jerukmanis, sembalun lawang, mertak, penujuk, kopang, senaru, batukliang, buwun mas, jerowaru, gili indah, sembalun bumbung, labuhan kertasari, lembar selatan, kawinda to'i Bima, kediri, ntobo kota Bima, pohgading timur, kerujuk, mantar KSB, dan sayang-sayang.

27.Sasaran Meningkatnya daya saing industri dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 166,39 Milyar Rupiah dan realisasi sebesar 94,66 Milyar Rupiah sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 56,89%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Kegiatan ini tersebar di 3 tempat yaitu, Dinas Perindustrian, Balai Kemasan, dan STIPark NTB.

Pada Dinas Perindustrian, kegiatan yang dilakukan yaitu Bimbingan teknis kawasan tembakau yang sudah dilaksanakan 1 kali. Pada Balai Kemasan, kegiatan yang dilakukan yaitu FGD kemasan bagi IKM Tembakau yang sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali di Kota Mataram. Pada STIPark NTB, kegiatan yang dilakukan yaitu pemberdayaan industri tembakau dan peran serta masyarakat yang sudah dilakukan sebanyak 1 kali.

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah (Target kinerja : 2,69%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.

Berdasarkan Capaian indikator, Dinas Perindustrian tahun 2021 mampu meningkatkan jumlah IKM sebesar 6,75 persen atau setara 6.449 IKM, dengan

fasilitasi IKM untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebesar 20 persen, peningkatan nilai investasi sebesar 171,02 milyar, Cakupan produk IKM yang terstandarisasi 81,82 persen, dan penggunaan teknologi dalam kapasitas produksi sebesar 91,43 persen.

- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang sudah terealisasi sesuai target yaitu 1 dokumen. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja : 5,99%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

UMKM di Provinsi NTB sebanyak 48.091 unit terdiri dari Usaha Mikro 38.999 unit (83%), Usaha Kecil 8.296 unit (15%) dan Usaha Menengah 796 unit (2%).

- e. Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja : 50,32%); Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dilatih (Target kinerja : 849 orang).; Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dibina (Target kinerja : 849 orang). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi. UMKM di Provinsi NTB sebanyak 48.091 unit terdiri dari Usaha Mikro 38.999 unit (83%), Usaha Kecil 8.296 unit (15%) dan Usaha Menengah 796 unit (2%). Jumlah Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah terealisasi sebanyak 3 UKM dari target 30 UKM. Target belum tercapai karena Kemampuan dan keahlian UKM belum memadai

dalam mengelola majemen usaha dan kemampuan akses IT sebagai media dalam Promosi dan Pemasaran.

- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator Kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%); dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

Pada tahun 2021 target 15 pemuda berprestasi tidak tercapai dikarenakan adanya pengalihan anggaran utk penanganan wabah COVID 19.

28.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target kinerja sebesar 3,30% dan realisasi sebesar 3,01% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 108,79%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi dengan target kinerja sebesar 20% dan realisasi sebesar 16,77% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 83,85%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi); Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (sub kegiatan : Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja); Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)); Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja).

Sebanyak 13.705 tenaga kerja yang sudah dilatih dari total pencari kerja terdaftar sebanyak 81.689 orang baik itu oleh BLK/LLK, LPKS, Pemagangan dalam negeri di perusahaan serta pemagangan luar negeri (magang jepang). Tenaga kerja terlatih tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota di NTB yaitu sebanyak 2.559 orang di Kota Mataram, 943 orang di Lombok Barat, 340 orang di Lombok Utara, 1.997 orang di Lombok Tengah, 4.939 orang di Lombok Timur, 301 orang di Sumbawa Barat, 500

orang di Sumbawa, 1.202 orang di Dompu, 408 orang di Kota Bima dan 516 orang di Bima.

- b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan dengan target kinerja sebesar 91,74% dan realisasi sebesar 46,15% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 50,31%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota (sub kegiatan : Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (sub kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja); Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan); Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi).

Rendahnya capaian Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di sector formal. Terdapat sebanyak 37.701 orang tenaga kerja yang sudah ditempatkan pada tahun 2021. Tenaga kerja tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota di NTB yaitu sebanyak 1.000 orang di Kota Mataram, 4.585 orang di Lombok Barat, 6.450 orang di Lombok Tengah, 10.236 orang di Lombok Timur, 3.726 orang di Sumbawa, 755 orang di Sumbawa Barat, 1.099 orang di Dompu, 3.800 orang di Bima, 3.500 orang di Kota Bima dan 2.550 orang di Lombok Utara.

- c. Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan dengan target kinerja sebesar 21% dan realisasi sebesar 15,53% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 73,95%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi ; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi); Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK) (sub kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK).

Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan sebanyak 572 perusahaan dari total 3.683 perusahaan yang terdaftar wajib lapor ketenagakerjaan.

perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan tersebar di seluruh Kabupaten/kota se NTB yaitu sebanyak 35 orang di Kota Mataram, 51 orang di Kota Bima, 27 orang di Sumbawa Barat, 64 orang di Sumbawa, 50 orang di Lombok Utara, 36 orang di Lombok Timur, 233 orang di Lombok Tengah, 50 orang di Lombok Barat, 21 orang di Dompu dan 5 orang di Bima.

- d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3 dengan target kinerja sebesar 21% dan realisasi sebesar 21,49% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 102,33%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan; Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan; Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan).

Pada tahun 2021 sebanyak 1.027 perusahaan yang sudah menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3 baik itu perusahaan besar, menengah dan kecil.

29. Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan

Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik social dengan target kinerja sebesar 16,67% dan realisasi sebesar 25% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 149,97%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik dengan target kinerja sebesar 10% dan realisasi sebesar 10% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

Pendekatan program dilakukan dengan Melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan pada Siswa SLTA di Daerah yang dipetakan rawan konflik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengisi dan mengasah jiwa dan wawasan kebangsaan agar kedepan NKRI ini tetap kokoh dan bersatu di tangan mereka para generasi muda bangsa.

Dengan adanya refocusing anggaran, Cakupan komunitas Sekolah perjumpaan dalam rangka pendidikan karakter dengan target awal 30% tidak dianggarkan di tahun 2021.

Model Sekolah Perjumpaan secara swadaya telah dieksperimentasikan dan telah terbentuk komunitas di 20-an titik sejak 2013.

- b.** Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik dengan target kinerja sebesar 10% dan realisasi sebesar 18,86% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 188,6%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pelaksanaan Kebijakan berupa hibah kepada Lembaga yang difasilitasi, Honorarium Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan; Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pelaksanaan kegiatan berupa Rapat Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKS, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dan Bimtek Dasar Intelejen; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Output kegiatan berupa Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah.; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. Pelaksanaan Kegiatan berupa Honorarium Forkopimda, Honorarium Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- c.** Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kinerja Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual (Kali) (sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali); dan Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)); Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen); Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesehatan (Dokumen); Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)); Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)).

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual sudah dilakukan sebanyak 1.434 kali, Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar 8 dokumen, Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3 dokumen.

- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif (target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 77,51% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 129,18%); Persentase Bumdes Berprestasi (target kinerja sebesar 14,43% dan realisasi sebesar 49,55% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 343,38%); Persentase Pokja Posyandu aktif (target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 79,22% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 132,03%); Persentase Posyantek yang aktif (target kinerja sebesar 47,86% dan realisasi sebesar 57,26% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 119,64%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Jumlah lembaga adat di NTB Tahun 2020 sebanyak 779 lembaga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se NTB. Sebanyak 49 lembaga di Lombok Barat, 32

lembaga di Lombok Utara, 130 lembaga di Lombok Tengah, 232 lembaga di Lombok Timur, 64 lembaga di Sumbawa Barat, 150 lembaga di Sumbawa, 21 lembaga di Dompu, 66 lembaga di Bima, 27 lembaga di Kota Mataram dan 8 lembaga di Kota Bima.

program unggulan BumDes Maju dilaksanakan melalui pengadaan peralatan mesin pengolah sampah dan mesin komoditi lainnya, dari pengadaan mesin tersebut diberikan kepada 101 Desa yang telah memiliki Bumdes, serta adanya pelaksanaan Bimtek bagi pengurus Bumdes sebanyak 404 orang.

- e. Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (Target kinerja : 63,64%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya); Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat).
- f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional. Realisasi program ini adalah 70% dari target 100% kesenian tradisional yang dikembangkan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
- g. Program Pembinaan Sejarah dengan indikator Kinerja Cakupan pembinaan sejarah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dengan capaian 100%. Sub kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

Pada tahun 2021, Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan adalah sebanyak 34,04% dari target 25% sekolah dengan Jumlah peserta Pembinaan sejarah di sekolah sebanyak 300 orang.

30. Sasaran Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dengan target kinerja sebesar 5,41% dan realisasi sebesar 31,21% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 576,89%. Pada Tahun 2021, terjadi kasus gangguan tibumtranmas

sejumlah 13 kasus dari target 17 kasus dan kasus pelanggaran perda/pergub sejumlah 11 kasus dari target 18 kasus. Setelah dihitung persentase selisih antara target jumlah kasus dan realisasi jumlah kasus sesuai dengan formula/rumus indikator, dihasilkan capaian indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun 2021 sebesar 31,21%. Persentase capaian yang tinggi diakibatkan oleh objek indikator yaitu kasus yang bersifat *unpredictable* dimana hampir tidak dapat diprediksi untuk menjadi target. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%); dan Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur); Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS).

Capaian penanganan kasus pada Tahun 2021 yang dilaksanakan Satpol PP Provinsi NTB adalah, Total aturan yang ditegakkan sebanyak 7 jenis yang terdiri dari 6 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Gubernur dengan rincian total kasus sebanyak 13 kasus, total pelanggar 1.122 pelanggar dan total tindakan non yustisi sebanyak 5 kali.

- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) dengan target kinerja sebesar 51,72% dan realisasi sebesar 41,67% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 80,57%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Pada Tahun 2021 tidak ada penetapan Desa Bersinar dikarenakan adanya Refocusing Anggaran, tetapi dilaksanakan pembinaan dan intervensi terhadap Desa Bersinar yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Penetapan Desa Bersinar telah dilaksanakan sejak tahun 2019 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Penetapan Desa Bersinar pada Tahun 2019 adalah Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Desa Tano Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, Desa Midang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Desa Teninga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan Penetapan Desa Bersinar Pada Tahun 2020 Adalah Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, Desa Cenggu Kecamatan Belo Kaupaten Bima, Desa Karijawa Kecamatan Labuhan Burung Kabupaten Dompu, Desa Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Desa Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

- c. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang

terbentuk; Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi; Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi; Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat; Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun ; Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi; dan Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM. Seluruh target pada indikator tersebut sebesar 100% dengan realisasi kinerja masing-masing sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota. Kegiatan kedua yaitu Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM dengan indikator kinerja persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi. Realisasi untuk kegiatan ini 100% dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum; dan Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM.

31. Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik dengan target kinerja sebesar 0,8% dan realisasi sebesar 0,61% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 76,25%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 125%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

Pada pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020, tercatat 81,00% masyarakat NTB berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Capaian ini lebih tinggi dari target KPU sebesar 77,50%. Di sisi lain capaian dalam menggunakan hak pilih ini tidak signifikans dengan capaian keterlibatan masyarakat dalam politik, dalam hal ini yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam berorganisasi yang hanya mencapai 0,65% dari target 0,70%.

- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Ormas yang aktif dengan target kinerja sebesar 79,66% dan realisasi sebesar 82,08% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 1023,04%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan monitoring secara kontiniu terhadap keberadaan dan kegiatan ORMAS yang telah terdaftar, namun tidak melapor keberadaan dan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah, termasuk melakukan tindakan tegas dan nyata dalam rangka pembinaannya untuk menghindari adanya ORMAS tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi sesuai dengan anggaran dasar yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Pemerintah, dan ORMAS yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32.Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dengan

Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (target kinerja sebesar 18,60% dan realisasi sebesar 27,24% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 146,45%) dan Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak (target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 50% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 83,33%). Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan PPRG dengan target kinerja sebesar 39,13% dan realisasi sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 255,56%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi); dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi).

Keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui pengarusutamaan gender di Provinsi NTB dapat dilihat dari dua indikator makro yaitu: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG di NTB Tahun 2021 sebesar 52,01 sedangkan capaian IPG sebesar 9,5.

- b. Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 90% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 90%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi); Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi; dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi).

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 462 kasus, Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek sebanyak 30 orang, Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus sebanyak 100 orang, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan sebanyak 68,15%, Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga.

- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga (Target kinerja : 4%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi; dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.

Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga pada DP3AP2KB sebanyak 4 desa, Jumlah Motekar Terlatih sebanyak 50 orang, Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGA sebanyak 50 orang

- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Dokumen Gender dengan target kinerja sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi. Jumlah dokumen gender yang tersedia pada DP3AP2KB sebanyak 1 dokumen, data gender anak sebanyak 1 dokumen, dan buku gender dan anak sebanyak 1 dokumen.

- e. Program Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak (target kinerja sebesar 60%) dan Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA (target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 50% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 83,33%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.

Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA sebesar 60%, Jumlah Kab/Kota yang memiliki regulasi ttg pemenuhan hak anak terdapat pada 6 kab/kota, Pertemuan Forum Anak Tingkat Provinsi telah dilakukan terhadap 100 orang.

Sampai dengan tahun 2021 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang telah memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat atas komitmennya untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak telah terbentuk 5 (lima) kabupaten/kota antara lain Kota Mataram yang memperoleh peringkat madya (tetap), Kabupaten Lombok Barat madya (naik), kabupaten Dompu madya (naik) dan Kabupaten Bima memperoleh peringkat pratama (tetap).

- f. Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Target kinerja : 68,15% dengan realisasi kinerja 100% sehingga tingkat capaiannya sebesar 146,74%); dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (target kinerja sebesar 90% dan realisasi sebesar 90% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi).

Dukungan terhadap pelaksanaan program ini antara lain: Persentase lembaga layanan perlindungan anak sebanyak 90%, Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan terhadap 30 orang, Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak pada 10 lembaga.

Tabel: Capaian Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah										
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	129,02	123,11	6.605.666.830	7.982.926.967	122,33	100,63	6.723.316.417	84,22
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,57	0,61	6.605.666.830	7.982.926.967	0,63	103,28	6.723.316.417	84,22
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%		25,48	4.159.298.730	6.800.276.967	24,08	94,51	5.769.603.917	84,84
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%		44,69	-		37,87	84,74		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%		100	2.446.368.100	1.182.650.000			953.712.500	80,64
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	76,02	78,56	0,00		78,81	100,32		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan	Persentase Kemantapan jalan	%	80,28	83,95	255.582.020.288	503.799.056.579	84,01	100,07	375.321.466.689	74,50

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
infrastruktur layanan dasar										
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	80,28	83,95	255.582.020.288	503.799.056.579	83,95	100,00	375.321.466.689	74,50
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,76	50,04	172.161.187.075	195.482.429.489	50,88	101,68	151.465.706.867	77,48
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74,15	74,55	172.161.187.075	195.482.429.489			151.465.706.867	77,48
	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi			76,12			75,52	99,21		
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	78,64	81,71	4.999.444.620	2.955.199.590	88,00	107,70	2.621.650.740	88,71
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	70,24	50,83	4.435.624.620	2.698.060.090	26,69	52,51	2.391.305.456	88,63
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	92,31	94,37	-		97,50	103,32		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	0	30	-		30	100,00		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi	%	0	46,2	-		48,84	105,71		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	baik									
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	0	59,39	563.820.000	257.139.500	0	0,00	230.345.284	89,58
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi										
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B			B	100		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	719.662.584.004	833.729.049.394	WTP	100	702.456.317.403	84,25
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%		100	711.669.242.304	827.611.862.457	100	100,00	696.783.667.013	84,19
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%		100	1.050.000.000		100	100,00		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%		60	1.777.298.800	2.483.655.200	60	100,00	2.226.259.531	89,64

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%		80	1.078.974.400	2.155.663.379	38,2	47,75	2.056.781.662	95,41
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%		40	2.119.203.000		0	0,00		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%		55,33	397.356.000	1.427.868.358	60,87	110,01	1.339.609.198	93,82
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%		95	1.570.509.500	50.000.000	55,17	58,07	50.000.000	100,00
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	34,77	35,41	15.135.970.000	13.886.486.100	35,45	100,11	11.274.715.156	81,19
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%		39,34	527.520.000	424.920.800	35,38	89,93	357.749.673	84,19
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%		55	14.608.450.000	13.461.565.300	50,47	91,76	10.916.965.483	81,10
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB (73,01 - 76,00)	20.847.306.100	16.115.345.263	BB	100	14.485.508.450	89,89

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%		100	4.233.604.000	2.517.806.000	100	100,00	2.305.303.963	91,56
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%		100	11.088.793.100	10.488.880.800	100	100,00	9.181.963.391	87,54
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%		84,44	826.621.500	557.166.621	0	0,00	531.609.016	95,41
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%		17,77	716.725.400	520.050.542	0	0,00	487.905.265	93,82
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan	%		80	1.147.912.100	786.600.400			736.421.708	93,62
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%		100	2.833.650.000	1.244.840.900	100	100,00	1.242.305.106	99,80
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,54	0,68	22.946.056.300	8.330.656.234	0,69	100,88	6.503.116.712	78,06
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem	Nilai		16			15	93,75		98,92

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Informasi				6.500.000.000	1.464.434.764			1.448.667.765	
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan	Nilai		80	-		75	93,75		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi	Nilai		88	-		62,5	71,02		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Nilai		132	-		112,5	85,23		
Program PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%		0,04	16.446.056.300	6.866.221.470			5.054.448.947	73,61
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%		0,05	-		0,01	20,00		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%		0,16	-		0,02	12,50		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%		0,16	-		0,13	81,25		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,63	4,23	9.763.214.800	10.628.677.900	3,70	87,47	10.058.647.390	94,64

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%		98,7	243.082.000	243.082.000	107,88	109,30	242.821.200	99,89
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%		100	180.700.000	180.699.600	100	100,00	180.369.600	99,82
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%		100	871.406.000	871.405.600	100	100,00	840.689.900	96,48
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%		15	47.500.000	116.622.900	17,85	119,00	108.578.400	93,10
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	40	60	4.644.327.700	5.847.185.600	100	166,67	5.578.395.810	95,40
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	25	45	1.707.159.000	1.484.404.000	61,76	137,24	1.287.761.893	86,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	NA	20	419.500.000	408.000.000	98,74	493,70	380.448.200	93,25

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	NA	30	409.000.000	310.170.000	32,61	108,70	291.127.987	93,86
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%		63	84.705.400	46.616.300	63	100	36.361.400	78,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%		100	976.769.200	1.037.249.000	100	100	1.028.850.100	99,19
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%		100	179.065.500	4.675.400	100	100	4.675.400	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang		39.000	-	78.567.500	4.827	12	78.567.500	100,00
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah										
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	71,20	71,97			71,83	99,81		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,28	66,78	247.823.303.924	831.347.506.455	66,69	99,86522911	497.901.511.774	59,89
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%		85	150.429.928.842	600.581.059.426			303.239.187.154	50,49
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%		97	-					
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%		65	-	57.486.337.676			44.512.539.496	77,43
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%		100	-					
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%		80	-	156.113.950.753	80	100	1,348E+11	86,37
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%		94	-					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%		90	-		100	111,11		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%		2	760.915.500	17.133.977.400	11,4	570,00	15.311.274.300	89,36
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%		30	32.181.200	32.181.200			6.150.000	19,11
	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%		90			100	111,11		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%		83	52.457.840.808		80,59	97,10		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	71,43	73,81	7.478.712.574		81,82	110,8521881		
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	80	-		80	100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	70,00	83,00	36.663.725.000		80,59	97,10		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	25,50	31,49	1.228.024.250	63.999.000	19,23	138,93	62.200.000	97,19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	14,41	12,41	-		5,59	45,04		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%		50	1.228.024.250	63.999.000	60	120,00	62.200.000	97,19
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	61,68	62,39	0,00		63,21	101,32		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57	13,68	553.283.712.177	585.905.420.608	13,9	101,61	518.513.862.713	88,50
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,27	7,01	0,00		7,38	105,28		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%		99,15	473.402.998.477	481.803.279.988	106,63	107,54	402.518.724.746	83,54
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%		93,4	-		96,65	103,48		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan / impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%		96,68	-			0,00		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%		69,4	-		85,57	123,30		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%		1,01	-		1,01	100,00		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%		1:8	-		1:11	104,41		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata- rata untuk SLB,	%		1:14	-		1:5	80		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%		100	567.849.300	148.351.200			120.573.900	81,28
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%		100	66.960.761.300	78.443.059.100			77.945.752.700	99,37
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%		99,55	-					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%		70	-					
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%		50	-					
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)			5,5	-					
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%		100	60.769.000	30.898.000			20.531.000	66,45
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%		100	200.000.000	113.371.900	33,33	33,33	107.375.000	94,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%		100	3.245.457.000	2.126.595.770			1.994.608.977	93,79
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%		100	-					
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%		100	8.845.877.100	23.239.864.650			35.806.296.390	154,07
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan										

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	64,56	67,98			69,89	102,81		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	40,23	42,83	1.809.772.599	5.500.731.299	45,10	105,30	5.192.072.259	94,39
	Indeks Kualitas Udara	Point	87,40	87,53	-		88,52	101,13		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	70,29	-		80,22	114,13		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		51,52	318.975.200	273.975.200	45,45	88,23	258.541.125	94,37
	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%		100,00		273.975.200	100,00	100,00	258.541.125	94,37
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		10	882.411.299	3.186.818.799	10	100,00	2.997.200.202	94,05
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi		1	23.583.400	23.583.400	-		23.507.400	99,68

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Persentase taman kehati yang terkelola	%		100	23.583.400	23.583.400	0	0,00	23.507.400	99,68
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit		210	0	23.083.400			22.843.091	98,96
	Persentase Unit Usaha Penghasil Limbah B3 yang tertib aturan	%		80	0		93,33	116,66		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiatan		20	188.369.500	1.142.444.500			1.082.404.621	94,74
	Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan			100	-		44,23	44,23		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%		10	196.834.200	196.834.200	3,7	37,00	195.605.980	99,38
	Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional	%		10	196.834.200	196.834.200	3,75	37,50	195.605.980	99,38

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok		0	-					
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan		20	199.599.000	159.599.000	18	90,00	134.315.335	84,16
	Persentase pengaduan yang terselesaikan	%		100	-		100	100,00		
Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	65,67	67,70	25.882.707.426	23.040.479.316	65,59	96,88	21.577.613.530	93,65
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%		67	19.206.000.606	16.301.618.306	39,45	59,11	15.207.712.739	93,29
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%		10,00	-		8,67	86,70		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		30.503	884.905.820	786.436.310	35.002	114,75	728.461.375	92,63
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		4,95	661.428.500	2.224.282.700	13,29	268,44	2.068.611.166	93,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah	DAS		8			5,00	62,50		96,31

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
ALIRAN SUNGAI (DAS)	DAS prioritas				4.449.374.500	3.430.124.500			3.303.514.393	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88	89,07	680.998.000	298.017.500	0,00	0,00	269.313.857	90,37
					-					
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	41,71	70,00	0,00		49,02	70,03		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	34,91	50,00	0,00		39,68	79,36		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	35,91	20,00	4823290800,00	8.098.129.450	9,34	46,70	6.982.656.139	86,23
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%		70	4.823.290.800	8.098.129.450	49,02	70,03	6.982.656.139	86,23
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi										
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	72,03	73,80			71,27	96,57		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	10023,79	13362,00	2.591.059.900	1.037.973.900	14879,27	111,36	998.198.239	96,17

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
perizinan										
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	Persen		3	493.277.000	204.909.000			196.304.333	95,80
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen		40	714.948.000	55.229.700	72,00	180,00	54.859.700	99,33
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen		87	531.292.100	155.322.600			149.232.306	96,08
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen		50	735.092.800	598.712.600			577.341.200	96,43
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen		100	116.450.000	23.800.000			20.460.700	85,97
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	33,29	29,01	203.142.648.467	227.520.452.936	43,44	149,74	170.240.593.696	74,82
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		9	44.457.563.187	81.116.562.000	6	66,67	61.620.533.200	75,97

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%		100	560.650.200	121.031.840.302	76	76,00	88.205.789.350	72,88
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%		< 1	2.778.593.340	740.088.034	0,06	100,00	436.744.550	59,01
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%		100	419.833.040	5.343.477.400	83	83,00	3.996.991.669	74,80
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%		11,51	20.209.054.200		0	0,00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	100	34	104.378.790.100		58	170,59		
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/paket	1	2	-		2	100,00		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	95	95,5	360.656.500	360.656.500	96,99	101,56	360.656.500	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%		5	5.431.885.000		10	200,00		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%		10	-		8,672	86,72		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	2,06	8,53	4.867.861.900	5.154.706.000	101,33	1187,92	4.452.003.267	86,37
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	229.794	241.843	6.336.155.300	6.220.179.000	239.954	99,22	4.843.194.546	77,86
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.140.552	1.195.104	3.022.814.500	2.450.315.700	935.522	78,28	2.203.712.434	89,94
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	70,00	99,91	4.851.624.000	4.822.624.000		0,00	3.858.685.280	80,01
	Persentase penurunan pelanggaran tindak pidana sektor kelautan dan perikanan			10	4.851.624.000		22	220,00		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	0,55	213130	615.543.200	280.004.000	214698	100,74	262.282.900	93,67
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100,00	100,00	30.172.957.410	28.396.264.390	100,00	100,00	23.004.541.452	81,01
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%		75	-		99,33	132,44		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%		100	764.118.500	978.877.500			793.239.660	81,04
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%		2,5	17.317.366.810	13.144.064.190			11.342.210.717	86,29
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%		100	12.091.472.100	14.273.322.700			10.869.091.075	76,15
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	85,30	86,20	4.629.826.680	3.041.586.399	90,40	104,87	2.965.101.148	97,49
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%		71,97	215.000.000	7.515.000	89,30	124,08	6.410.000	85,30
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	2331,4	100	3.517.365.780	2.578.113.900	100	100,00	2.537.054.635	98,41
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%		5,77	358.435.000	252.757.000	2,97	51,47	232.574.582	92,02

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%		80,00	539.025.900	203.200.499	100,00	125,00	189.061.931	93,04
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	72,59	76,48	2.936.368.000	3.123.387.600	78,76	102,98	2.823.737.600	90,41
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	74,69	76,48	2.936.368.000	3.123.387.600	78,76	102,98	2.823.737.600	90,41
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	78,80	80,10	256.812.896.004	309.475.917.154	87,78	109,59	229.177.627.423	74,05
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%		75,00	0		74,50	99,33		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha			256.812.896.004	309.475.917.154			229.177.627.423	74,05
	Luasan Prasarana dalam kondisi baik	Ha		85	-		95,31	112,13		
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99,55	99,77	2.108.878.220	1.339.199.980	99,98	100,21	1.087.629.900	81,21
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam	%		5,96	557.222.820	128.544.580	6,70	112,42	114.408.500	89,00

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Pembangkit Listrik									
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,55	99,77	1.551.655.400	1.210.655.400	99,98	100,21	973.221.400	80,39
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga)			800	-		700	87,50		
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	56,35	62,65	1.943.219.300	1.011.015.400	63,47	101,31	422.188.100	41,76
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%		100	1.943.219.300	1.011.015.400	63,47	63,47	422.188.100	41,76
	Rumah tangga menempati hunian layak	%		62,65	-		63,57	64,34		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	1,87	3,0 - 4,0	16.519.587.900	9.759.303.500	2,12	129,33	9.006.031.912	92,28
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok	%		60	280.000.000	104.508.200	60	100,00	86.148.330	82,43

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Penting									
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%		4	1.658.499.800	1.771.971.200	3,88	97,00	1.643.883.214	92,77
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%		1	1.303.456.900	513.793.200	1,93	193,00	459.172.518	89,37
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%		80	1.253.499.600	570.554.300	81	101,25	519.199.900	91,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%		100	12.024.131.600	6.798.476.600	20	20,00	6.297.627.950	92,63
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	10640,00	11273,02	3.703.875.000	4.566.571.200	10377,00	92,05	1.056.085.326	23,13
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		100	3.703.875.000	4.566.571.200	100	100,00	1.056.085.326	23,13
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	-0,08	1,50	-	-	1,35	90,00	-	-

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	dalam PDRB (%)									
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	117,21	122,71	8.460.169.702	7.890.209.100	15,20	12,39	6.404.672.181	81,17
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%		65,66	4.992.741.802	4.008.091.880			2.786.331.833	69,52
	Persentase Geosite yang tertata	%		37,5	-					
	Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata Minimal Berkembang			20			22	110,00		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		4.650.000	2.240.149.900	2.929.861.700			2.833.201.177	96,70
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		1.000.000			964.036	96,40		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai	%		30,21	164.700.000	374.799.900	30,43	100,72	316.988.266	84,58

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
INTELEKTUAL	ekonomi kreatif									
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		60	1.062.578.000	577.455.620			468.150.905	81,07
	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompeten			60			60,5	100,83		
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	4,57	6,50	-		6,75	103,85		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	164,96	166,39	35.057.051.711	19.046.504.752	94,66	56,89	14.220.121.031	74,66
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%		100	27.070.135.811	13.171.036.482			9.116.274.410	69,21
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%		2,69	798.525.000	622.904.000			534.281.452	85,77
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri	%		1	540.498.000	419.309.000			202.144.334	48,21

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Nasional									
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%		5,99	1.280.297.500	1.232.568.600			940.146.158	76,28
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%		50,32	2.122.138.400	1.474.090.900			1.432.665.700	97,19
	Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dilatih	orang		849,00						849,00
	Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dibina	orang		849,00						849,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%		100	3.245.457.000	2.126.595.770			1.994.608.977	93,79
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%		100		-				
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,42	3,30	3.135.528.030	2.122.967.730	3,01	108,79	1.859.138.500	87,57
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		20	829.654.400	464.055.900	16,77	83,85	340.123.600	73,29

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Teregistrasi Yang Ditempatkan	%		91,74	991.936.430	696.946.230	46,15	50,31	614.163.200	88,12
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%		21	299.995.600	192.995.600			186.002.400	96,38
	Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan			21	299.995.600		15,53	73,95		
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		21	1.013.941.600	768.970.000	21,49	102,33	718.849.300	93,48
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan										
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	12,71	14,85			10,67	128,15		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	46,15	16,67	100.539.460.100	94.019.783.800	25,00	149,97	86.435.935.505	91,93
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	20	10	457.500.000	145.550.000	10	100	142.880.000	98,17

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	5,83	10	3.328.089.000	4.692.861.000	18,86	188,6	4.276.063.000	91,12
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%		100	87.426.891.700	81.039.126.600	100	100	74.058.855.710	91,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%		60	6.798.099.800	6.012.392.100	77,51	129,18	5.981.725.595	99,49
	Persentase Bumdes Berprestasi	%		14,43	-		49,55	343,38		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%		60	-		79,22	132,03		
	Persentase Posyantek yang aktif	%		47,86	-		57,26	119,64		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%		63,64	1.975.050.900	1.859.641.000			1.746.748.100	93,93
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%		100	389.516.700	166.023.100	70	70,00	125.642.600	75,68
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan	%		100						99,84

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	sejarah				164.312.000	104.190.000			104.020.500	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,88	5,41	5.305.567.700	3.942.573.400	31,21	576,89	3.433.918.812	87,10
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	100,00	2.864.180.600	2.630.701.700	100,00	100,00	2.165.979.550	82,33
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	-		100,00	100,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	17,24	51,72	730.272.000	424.760.000	41,67	80,57	418.098.100	98,43
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%		100	1.711.115.100	887.111.700	100	100,00	849.841.162	95,80
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terevaluasi	%		100	-		100	100,00		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%		100	-		100	100,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%		100	-		100	100,00		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%		100	-		100	100,00		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%		100	-		100	100,00		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%		100	-		100	100,00		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	82,80	83,74	0,00		0,00	0,00		
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,60	0,80	5.142.453.000	4.592.706.000	0,61	76,25	4.592.294.700	99,99
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	50	80	4.653.634.000	4.168.341.000	100	125	4.168.299.700	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,33	79,66	488.819.000	424.365.000	82,08	103,04	423.995.000	99,91

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	55,81	59,81	-	-	52,01	86,95870256		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	18,60	-	-	27,24	146,45		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	40,00	60,00	3.868.693.400	3.297.268.900	50,00	83,33	2.432.079.226	73,76
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	13,04	39,13	1.769.040.900	1.485.864.200	100,00	255,56	1.326.000.000	89,24
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%		75,52	805.507.900	791.516.700			522.412.108	66,00
	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan			100,00			90,00	90,00		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	4	4	380.653.000	368.163.000	NA	NA	221.313.118	60,11
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender			1	34.997.400	34.997.400	1	100,00	30.397.400	86,86
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Cakupan Kabupaten/Kota Layak	%	20,00							22,29

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Tahun 2021						
				RPJMD/Renstra		APBD	Kinerja		Keuangan	
				Target	Rp. (Juta)	Rp.	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan
(PHA)	Anak			60	360.562.500	182.267.500			40.627.500	
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%		60,00	-		50,00	83,33		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	1,00	68,15	517.931.700	434.460.100	100,00	146,74	291.329.100	67,06
	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			68,15	0		100,00	146,74		
	Persentase lembaga layanan perlindungan anak	%		90	0		90	100		

4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai tahun 2021

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pada tahun 2021 tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			Point	123.11
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah	Indeks Aksesibilitas			Point	78.56
		Pengembangan Sektor Unggulan		Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04
			Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup Persentase Balita <i>Stunting</i>	Point Tahun %	71.97 66.78 31.49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah Rata rata Lama Sekolah	Point Tahun Tahun	62.39 13.68 7.01
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point Point Point Point	67.72 42.83 87.53 87.60 67.70
			Neraca pengelolaan sampah	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	% %	70.00 50.00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
					Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	73.80
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.1
					Rasio Elektrifikasi	%	99.77
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,273

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	1.50
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122.71
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	6.50
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166.39
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.85
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41
			Partisipasi politik masyarakat			%	83.74
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59.81
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.60

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021, 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja berdasarkan tabel diatas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur pada tahun 2021. Adapun tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Misi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

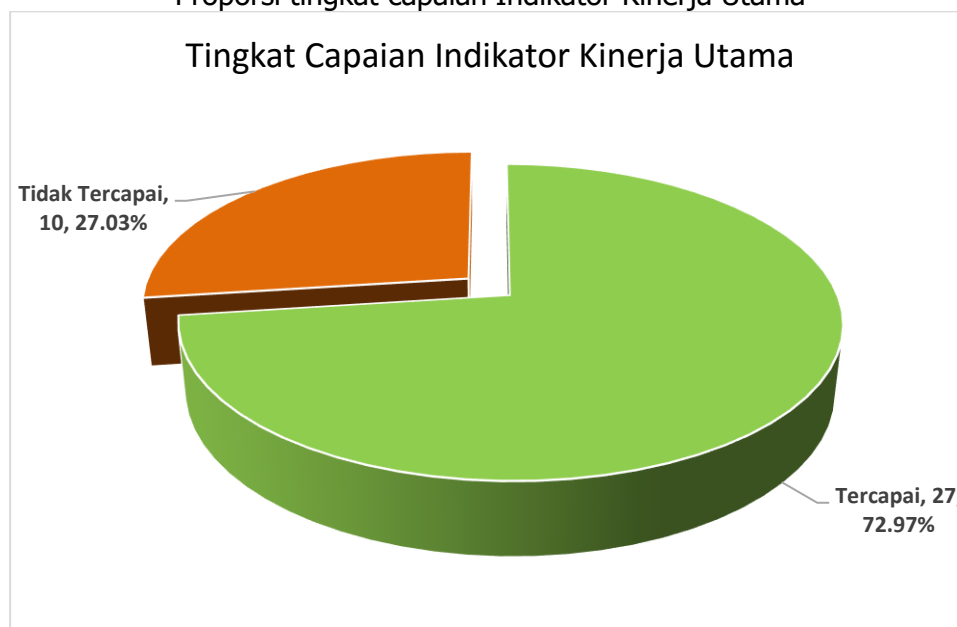
No	Indikator	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAN melalui Nenguatan mitigasi bencana dan Nengembangkan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
1	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,61	0,63	103,28
2	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	84,01	100,07
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	50,88	101,68
4	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	88,00	107,70
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
5	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	35,46	100,14
7	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	100,00
8	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68	0,69	100,88
9	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23	3,54	83,69
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87
11	Persentase Balita Stunting	%	31,49	19,23	138,93
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,90	101,61
13	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,38	105,28
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
14	Indeks Kualitas Air	Point	42,83	45,10	105,30

No	Indikator	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
15	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53	88,52	101,13
16	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,29	80,22	114,13
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70	65,59	96,88
18	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	39,68	79,36
19	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,34	46,70
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
20	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Miliar	13.362	14.879	111,36
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	26,40	112,24
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	SKor	86,20	90,40	104,87
24	Cakupan Air Minum	%	76,48	78,76	102,98
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	87,78	109,59
26	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65	63,47	101,31
28	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,12	129,33
29	Pengeluaran per kapita	Rp. 000	11.273,02	10.377,00	92,05
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122,71	15,20	12,39
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166,39	94,66	56,89
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
33	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67	25,00	149,97
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	31,21	576,89
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80	0,61	76,25
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	27,24	146,45
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33

Sumber: Kemen-LHK, KemenPAN RB, BPS dan Perangkat Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2021, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya adalah Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target antara lain: Angka Harapan Hidup, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Indeks Pelayanan Publik, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Grafik. 3. 1.
Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama



Sumber: data diolah

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

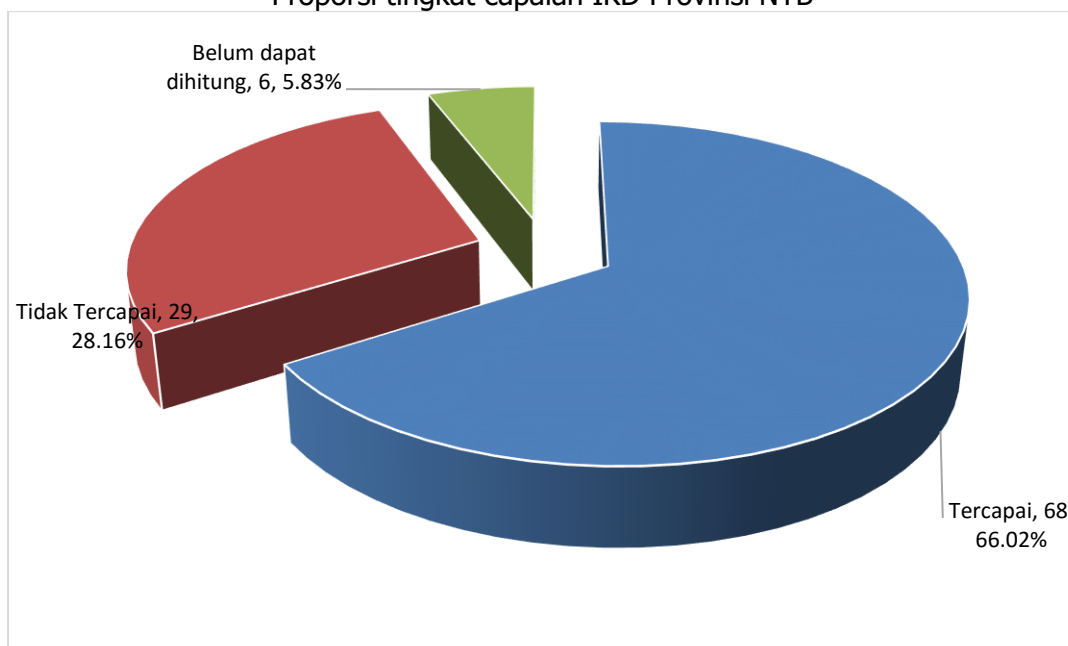
2. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik; dan

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan

Grafik. 3. 2.
Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: data diolah

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2021 secara keseluruhan terdapat 68 indikator atau 66,02 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 29 indikator belum memenuhi target dan masih terdapat 6 indikator belum tersedia (*Not Available/NA*) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait. Deskripsi capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3.
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

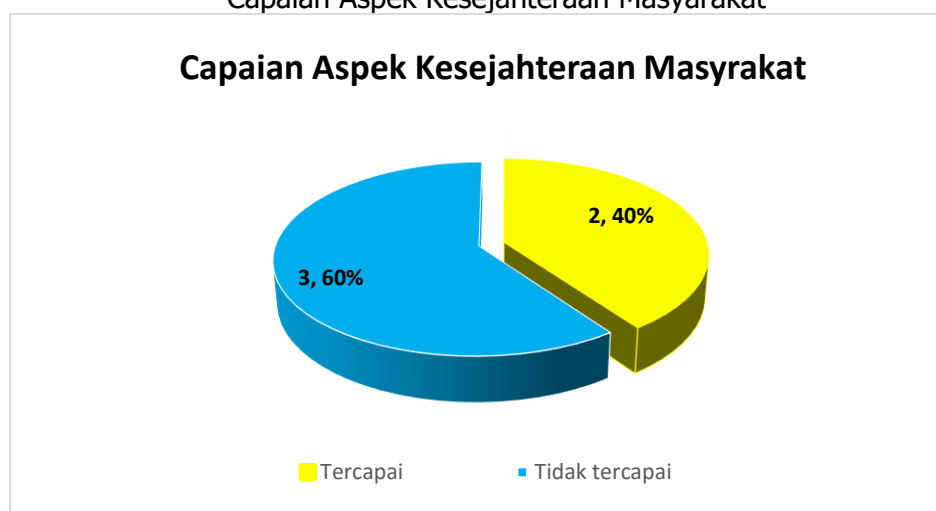
No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	2,5-3,5	4,09	155,81
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,12	129,33
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,42	13,83	96,94
4	Gini Ratio	Point	0,353	0,384	91,34

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,84	68,65	99,72

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2021

Dari 5 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi NTB sudah semakin membaik yang ditandai dengan pertumbuhan positif mencapai 2,30 persen termasuk tambang dan 4,09 persen tanpa tambang, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen. Kondisi tersebut disebabkan adanya pandemi global covid-19 sejak tahun 2020 hingga saat ini yang membuat ekonomi global, nasional, dan regional tertekan.

Grafik. 3. 3.
Capaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat



Sumber: data diolah

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berkali-kali di tahun 2021 memberikan dampak terhadap terutama pada sektor perekonomian, seperti tingkat konsumsi masyarakat yang melambat, hal ini dikarenakan pekerja bekerja dari rumah, pusat pembelanjaan tutup, restoran hanya buka untuk pesan antar dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar, toko kelontong untuk beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengalami tekanan akibat tidak melakukan kegiatan usaha sehingga terganggunya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Penghasilan yang tidak menentu menyebabkan kesulitan untuk membayar pegawai serta perekonomian rumah tangga. Sektor lain juga yang terdampak adalah industri pariwisata, dimana terdapat sektor yang terkait kepariwisataan seperti akomodasi wisata atau perhotelan, transportasi, dan makan minum. Dengan diterapkannya pembatasan sosial membuat kegiatan masyarakat menjadi sangat terbatas dimulai dari penutupan jalan keluar kota, dilarangnya berkumpul

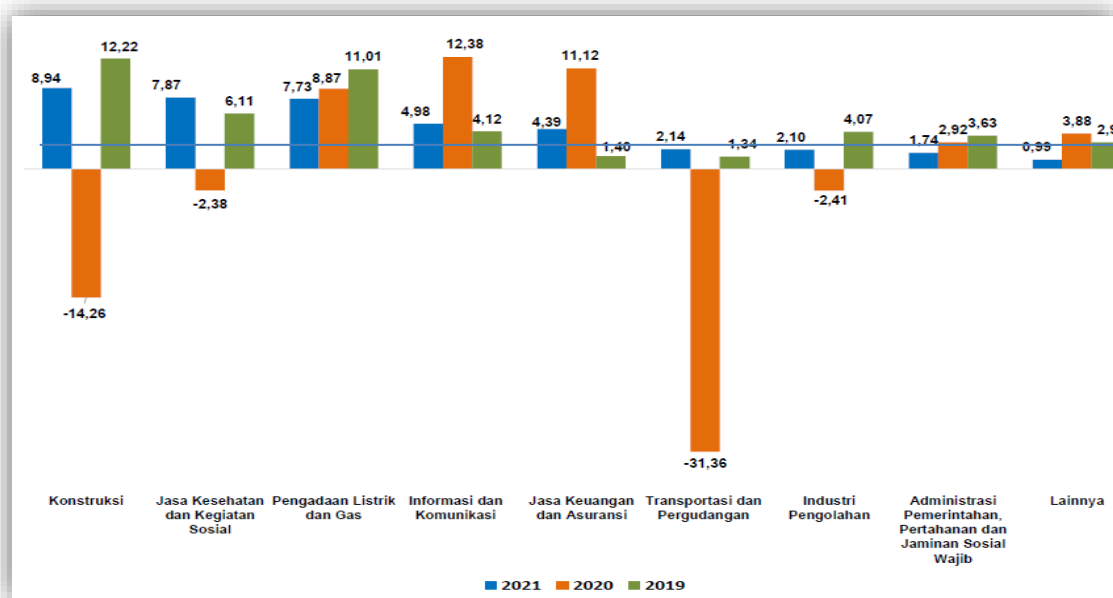
dalam jumlah besar yang menyebabkan banyak calon wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri membatalkan kunjungan ke Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Bagi Provinsi NTB, sektor kepariwisataan sangat berperan dalam mengembangkan perekonomian daerah, hal ini terlihat dari angka kunjungan wisatawan dari lebih 3 juta orang sebelum pandemi Covid-19, menurun drastis menjadi dibawah 500 ribu orang di saat pandemi. Begitu juga dengan sektor-sektor lain yang terdampak seperti sektor perdagangan dan industri manufaktur mengalami penurunan hebat akibat meluasnya penularan Covid-19. Melemahnya ekonomi karena kondisi berkepanjangan dan ketidakpastian tentu akan menciptakan kelesuan ekonomi dan bisnis, sehingga berdampak pada perekonomian daerah mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen

Penyelenggaraan *event* internasional Idemitsu Asia *Talent Cup* (IATC) dan *World Superbike* (WSBK) di Sirkuit Mandalika pada tahun 2021, telah memberikan dampak ekonomi di NTB. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan di NTB yang mencapai 100% jika dibandingkan dengan tahun 2020, adanya peningkatan okupansi hotel yang tadinya hanya 15 persen menjadi 95 persen, meningkatnya omzet bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) local, serta adanya penyerapan tenaga kerja dengan merekrut 1.475 tenaga kerja dari NTB, termasuk penduduk dari enam desa penyangga di sekitar Mandalika. Berbagai terobosan juga telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid-19, diantaranya dengan mendorong optimalisasi pengembangan komoditas/produk/jenis usaha unggulan daerah melalui industrialisasi produk unggulan daerah serta mendorong IKM dan UMKM menjadi sektor lokomotif ekonomi daerah melalui pengembangan produk, pengembangan SDM, pengembangan IKM dan UMKM, dan pengembangan Kawasan. Mengembangkan industri pariwisata melalui dengan terus mengembangkan desa wisata. Disamping itu, juga dilakukan peningkatan infrastruktur strategis untuk membangkitkan perekonomian di NTB, diantaranya infrastruktur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB sebagai sentral rumah sakit rujukan kesehatan bagi masyarakat NTB serta mampu menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional serta pembangunan infrastruktur jalan yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata.

Berdasarkan data hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Ekonomi NTB tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen. Pertumbuhan ini di antaranya didorong adanya event World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, pada November 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan IV-2021 dibandingkan dengan keadaan pada triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,14 persen. Pada sektor lain yang mengalami pertumbuhan yaitu sektor transportasi dan pergudangan, tumbuh 8,11 persen karena naiknya penunpangan transportasi udara

dibandingkan triwulan IV tahun 2020. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tumbuh 7,20 persen. Karena sektor pariwisata yang mengakibatkan peningkatan pada TPK (tingkat penghunian kamar hotel), serta pengunjung restoran. Sementara itu, sektor yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 0,15 persen.

Grafik. 3. 4.
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



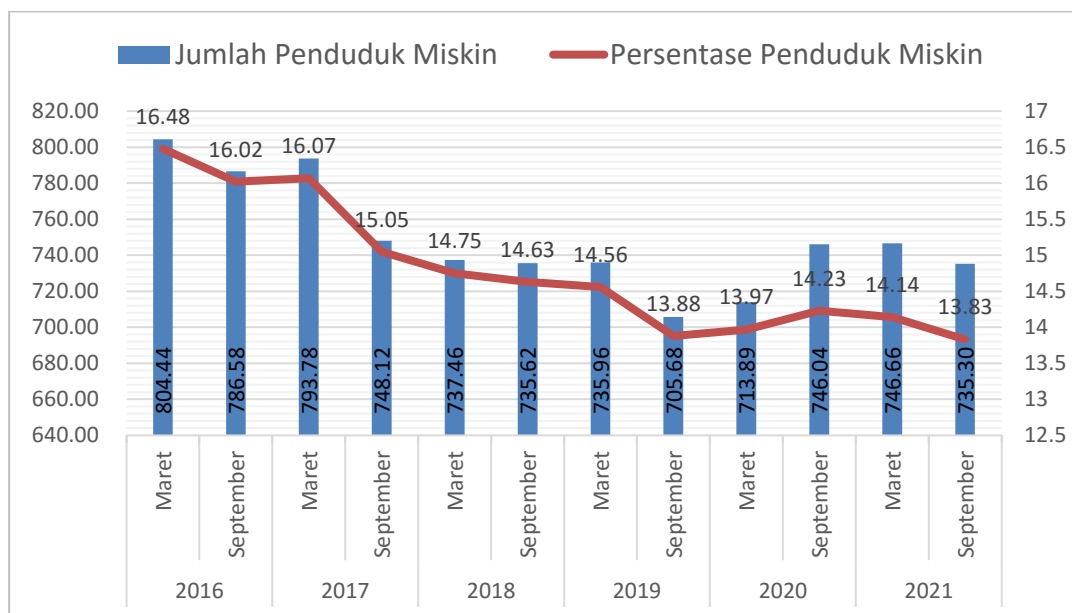
Sumber: BPS Provinsi NTB

Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,72 persen. Ekonomi NTB triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,53 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,91 persen. Secara umum, Ekonomi NTB tanpa memasukkan kategori tambang pada triwulan IV-2021 mengalami kontraksi (tumbuh negative) 2,57 persen (q-to-q), tumbuh 4,09 persen (y-on-y), dan tumbuh 2,85 persen (c-to-c).

Pada indikator kemiskinan mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2021 – September 2021, yaitu sebesar 0,31 persen poin. Selain itu, nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 746.040 orang (14,23 persen). Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2021 tercatat sebesar 735.030 orang. Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021 lalu, di mana jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746.660 orang terdiri dari jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 387.670 orang atau 14,54 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 347.640 orang atau 13,12 persen. Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2021, sumbangan Garis

Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,27 persen untuk perkotaan, dan 74,57 persen untuk perdesaan.

Grafik. 3. 5.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di NTB



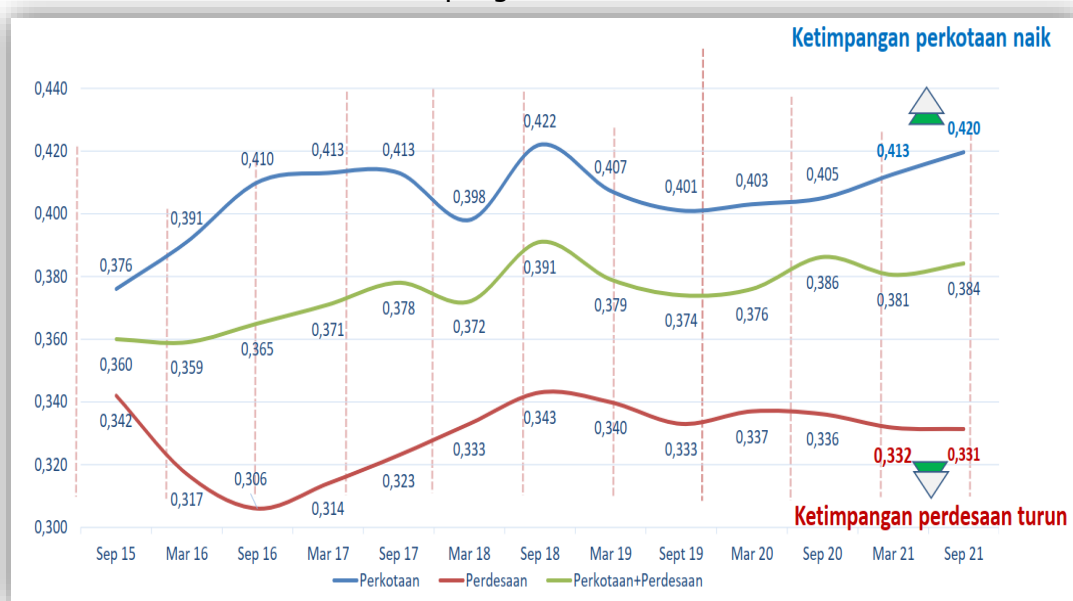
Sumber: BPS Provinsi NTB

Angka kemiskinan Provinsi NTB tahun 2021 berhasil diturunkan sebesar 0,31 persen dari angka kemiskinan tahun 2020 yang mencapai 14,23 persen, atau berkurang menjadi 13,84 persen tahun 2021. Capaian tersebut masih di atas target penurunan kemiskinan tahun 2021 dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023 yang ditetapkan sebesar 13,42 persen. Penurunan angka kemiskinan NTB dalam satu tahun terakhir memang cukup berat, dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk miskin selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk terus berikhtiar menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi belanja daerah terutama untuk memenuhi pelayanan dasar mencapai Rp.4.282.392.432.976,00 atau mencapai 67,12% dari total belanja daerah, mendorong Gerakan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan dengan membangun komitmen multi pihak; mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dengan kolaborasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan serta mendorong percepatan penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB pada September tahun 2021 tercatat sebesar 0,384 atau mengalami penurunan sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini rasio september 2020 sebesar 0,386. Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai *Gini Ratio* provinsi NTB berfluktuasi dalam

rentang yang cukup stabil, yaitu diantara 0,348 sampai 0,391. Nilai tertinggi *Gini Ratio* NTB adalah 0,391 yaitu pada September 2014 dan September 2018. Sedangkan nilai terendah adalah 0,348 yaitu pada September 2012. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,420, mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2021 yang sebesar 0,413. Jika dibandingkan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,405, *Gini Ratio* September 2021 daerah perkotaan meningkat sebesar 0,015 poin. Kemudian untuk daerah perdesaan, *Gini Ratio* September 2021 tercatat sebesar 0,331. Berbeda dengan daerah perkotaan, *Gini Ratio* pada daerah perdesaan justru turun 0,001 poin dari Maret 2021. Sedangkan jika dibandingkan September 2020, nilai ini turun 0,005 poin.

Grafik. 3. 6.
Ketimpangan Gini Ratio



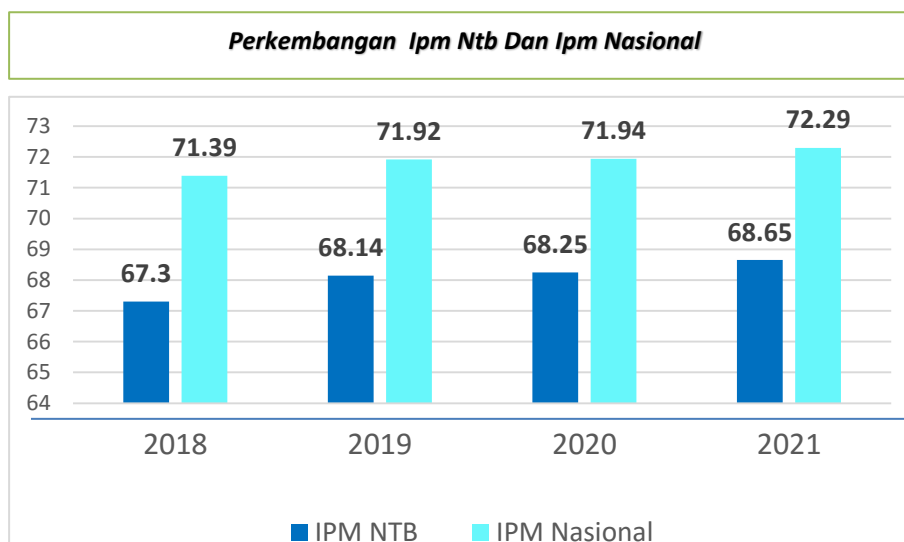
Sumber: BPS Provinsi NTB

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang membagi tingkat ketimpangan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,59 persen, yang berarti provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah.

Dalam satu dekade pembangunan manusia di Provinsi NTB antara tahun 2010 sampai dengan 2019 terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 1,21 persen per tahun. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Provinsi NTB, yang menyebabkan pertumbuhan IPM Provinsi NTB mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2021 menjadi sebesar 1,06 persen per tahun. Pada tahun 2020, IPM Provinsi NTB tercatat sebesar 68,25 atau tumbuh 0,16 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kemudian IPM Provinsi NTB tahun 2021 adalah sebesar 68,65 atau

tumbuh 0,59 persen. Pelambatan capaian disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, hal ini dapat dilihat dari pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan yang sudah mencapai Rp.10, 64 juta pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) dan menurun menjadi Rp.10,38 juta pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,72 persen.

Grafik 3.7.
Perkembangan IPM NTB dan IPM Nasional 2018-2021



Adapun komponen IPM lainnya seperti Usia harapan Hidup (UHH), Rata-rata lama sekolah (RLS), dan harapan lama sekolah (HLS) masih tetap tumbuh positif namun mengalami perlambatan. periode 2010 hingga 2021, UHH Provinsi NTB telah meningkat sebesar 2,87 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,40 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi NTB adalah 63,82 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 66,69 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Provinsi NTB tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami perlambatan, tumbuh 0,35 persen dan 0,27, melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang mencapai 0,62 persen. Sementara itu, HLS Provinsi NTB telah meningkat 2,24 tahun, sementara RLS meningkat 1,65 tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, HLS Provinsi NTB tahun 2020 dan tahun 2021 masih tumbuh 0,22 persen dan 0,20 persen. Sedangkan RLS Provinsi NTB tumbuh 0,04 persen pada tahun 2020 dan 0,07 persen pada tahun 2021, melambat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,24 persen.

Adanya perlambatan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) salah satunya disebabkan oleh masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI). Dalam 3 tahun terakhir AKB di NTB cukup tinggi mencapai lebih dari 800 kasus per tahun, sementara kasus kematian Ibu juga meningkat dalam tiga tahun terakhir dari 97 kasus pada tahun 2019 menjadi 144 kasus pada tahun 2021. Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menekan kematian bayi dan kematian ibu, yang salah satunya melalui revitalisasi posyandu. Jumlah Posyandu tahun 2021 sebanyak 7.581 Posyandu atau mengalami peningkatan sebanyak 107 posyandu jika dibandingkan tahun

2020 sebanyak 7.474 posyandu, dan yang menjadi Posyandu Keluarga sebanyak 7.581 Posyandu (100%). Secara kuantitas telah meningkat dan telah mencapai target yang diharapkan (100%), namun secara kualitas masih harus ditingkatkan lagi khususnya integrasi kegiatan/pelayanan, masih banyak yang belum terintegrasi, baik kegiatan Kesehatan maupun kegiatan dengan sector lain (PAUD, Bank Sampah, BKB, BUMDES, UMKM). Disamping itu, juga dilakukan determinasi terutama pada pernikahan dini, Adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/Pemberian Makan bayi balita yang tidak tepat, Jaminan Pelayanan Kesehatan, Akses sanitasi dan air bersih dan ibu hamil serta remaja putri tidak mengkonsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah.

2. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 8 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

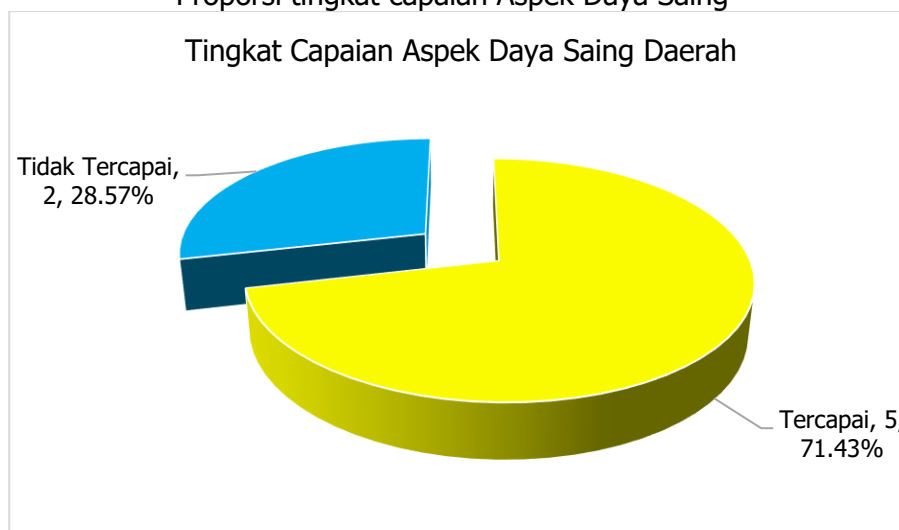
Tabel 3. 4.
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	14,85	10,67	128,15
2	Indeks Aksesibilitas	Point	78,56	78,81	100,32
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67,98	69,89	102,81
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89,03	76,38	85,79
5	Indeks Risiko Bencana	Point	123,11	122,33	100,63
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	100
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23	3,54	83,69

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

Dari 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 5 (lima) indikator tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, dan Indeks Pelayanan Publik.

Grafik. 3. 7.
Proporsi tingkat capaian Aspek Daya Saing



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

Dalam mewujudkan kondusifitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas dari 7.015 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 5.635 kasus pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebanyak 1380 kasus atau 20%. Penurunan kasus kriminalitas berimplikasi pada penurunan indeks kriminalitas dari 13,09 poin pada tahun 2020 menurun menjadi 10,67 poin pada tahun 2021. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap. Sebagai wujud keberhasilan itu, bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Promoter Reward. Penghargaan diberikan atas peran aktif Gubernur NTB dan bersinergi dengan TNI bersama Polda NTB dalam memberikan rasa aman, yang merupakan implementasi penguatan program kapolri dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap.

Dalam menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, pemerintah provinsi NTB terus mendorong untuk meningkatkan kemandirian jalan terutama yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata, mewujudkan konektivitas transportasi publik, mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membangun perumahan yang layak dan aman, menguatkan sistem irigasi yang mantap untuk meningkatkan produksi pangan, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air minum bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur daerah yang memadai ditandai dengan terus meningkatnya indeks

aksesibilitas di NTB 77,77 poin pada tahun 2020 meningkat menjadi 78,81 poin pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 1,34%.

Aspek lain sebagai bagian dalam menggambarkan daya saing daerah adalah kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Berdasarkan metode perhitungan yang baru dengan menambah komponen kualitas air laut, IKLH Provinsi NTB pada tahun 2021 mencapai 69,89 poin atau melampaui target sebesar 67,98 poin. Tingginya angka IKLH Provinsi NTB menunjukkan semakin baiknya kualitas kualitas air, udara, lahan dan air laut di Provinsi NTB.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, juga perlu didukung oleh birokrasi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah.

Salah satu langkah dalam mereformasi birokrasi adalah dengan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan PermenPANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sebagai tindaklanjut penyederhanaan birokrasi, pemerintah provinsi NTB telah mengalihkan pejabat pengawas dan administrator menjadi pejabat fungsional, dimana sebanyak 742 orang pejabat fungsional di lingkup Pemprov NTB, terdiri dari pejabat eselon III pengawas dan eselon IV administrator yang telah dialihkan menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan ini dilakukan untuk menghadirkan sosok ASN yang secara kelembagaan kecil, lincah dan produktif dengan memperbanyak, memperkaya jabatan – jabatan fungsional yang harus diisi oleh ASN – ASN yang kompeten dan profesional kedepannya.

Sementara itu, dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Penerapan akuntabilitas kinerja yang konsisten di instansi daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, Kemajuan teknologi yang begitu cepat juga menuntut birokrasi beradaptasi dengan cepat pula. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE ke depannya akan diterapkan dalam berbagai layanan publik dan administrasi digital pemerintah yang terintegrasi. SPBE juga akan dimanfaatkan dalam transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan *big data* pemerintah dan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Sedangkan dalam meningkatkan pelayanan publik,

dilakukan pengukuran kualitas pelayanan publik melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP). Untuk provinsi, kualitas pelayanan publik yang dinilai dan dievaluasi adalah DPMPSTSP dan Samsat. Sampai dengan tahun 2021, Nilai SAKIP Provinsi NTB telah mencapai level BB, sedangkan indeks SPBE telah mencapai 2,94 poin. Adapun IPP menuju level 3,7 (kategori baik).

Dengan capaian berbagai komponen yang mejadi bagian reformasi birokrasi, maka penilaian keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Pada tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai level B.

3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5.
Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	62,39	63,21	101,32
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,9	101,61
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,38	105,28
1.02	Kesehatan				
1	Indeks Kesehatan	Point	71,97	71,83	99,81
2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	77,00	83,22	108,08
3	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	87,78	109,59
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87
5	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,49	19,23	138,93
6	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	84,01	100,07
2	Cakupan Air Minum	%	76,48	78,76	102,98
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	50,88	101,68
4	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	9,09	9,09	100,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65	63,47	101,31
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	31,21	576,89
2	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	20,97	51,38	245,04
5	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,61	0,63	103,28
1.06	Sosial				
1	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,87	13,21	271,25
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,81	52,01	86,96
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,46	90,5	100,04
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,70	20,20	97,58
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	27,24	146,45
5	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33
2.03	Pangan				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,20	90,40	104,87
2.04	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Air	Point	42,83	45,10	105,30
2	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53	88,52	101,13
3	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,29	80,22	114,13
4	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	70,00	49,02	70,03
5	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	39,68	79,36
6	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,34	46,7
2.05	Pertanahan				
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84	1,08	128,57
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	29,01	43,44	149,74
2	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	86,00	92,74	107,84
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1,04	1,39	66,35
2.09	Perhubungan				
1	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	88	107,70
2.10	Komunikasi dan Informatika				
1	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif	Transaksi	101,38
2	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50	59,09	118,18
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Persentase Koperasi Aktif	%	65,00	76,12	117,11
2.12	Penanaman Modal				
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13.362	14.879,3	111,36
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
1	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	35	41	117,14
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	6	40,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
3	Proporsi wirausaha muda	%	68,18	68,07	99,84
2.14	Statistik				
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	30,00	98,74	329,13
2.15	Persandian				
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II+	II	81,6
2.16	Kebudayaan				
1	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	24,35	20,00	82,14
2.17	Perpustakaan				
1	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	31,89	32,76	102,74
2.18	Kearsipan				
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	66,67	67,45	101,18
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75	4,78	100,62
2	Produksi Perikanan	Ton	1.436.947	1.175.295	81,79
3	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	116,58	105,98
3.02	Pariwisata				
1	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	1,50	1,35	90,00
2	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	60,00	67,68	112,80
3	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,10	2,23	71,94
4	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.650.000	964.036	20,73
5	Persentase Geosites yang Tertata	%	25,00	100,00	400,00
6	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	122,71	15,20	12,39
3.03	Pertanian				
1	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	26,40	112,24
2	Nilai Tukar Petani	Point	>105	105,73	100,70
3.04	Kehutanan				
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70	65,59	96,88

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
2	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	10,08	7,29	72,32
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
1	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21
3.06	Perdagangan				
1	Indeks Daya Beli	Point	73,80	71,27	96,57
2	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.273	10.377	92,05
3.07	Perindustrian				
1	Pertumbuhan Industri	%	6,50	6,75	103,85
2	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	166,39	94,66	56,89
3	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	2,69	NA	NA
3.08	Transmigrasi				
1	Cakupan Penempatan Transmigran	%	90	97,57	108,41
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
1	Ranking Nasional LPPD	Ranking	7	NA	NA
2	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	28,00	NA	NA
5	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	3	100,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100
5.02	Keuangan				
1	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,50	0,51	101,00
3	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	35,46	100,14
5.03	Kepegawaian				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68	0,69	100,88
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25	0,25	100,00
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	24,00	100,00	416,67
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				
1	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	100,00
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,46	NA	NA
2	Partisipasi Politik Masyarakat	%	83,74	NA	NA
3	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	30,00	NA	NA
4	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67	25,00	149,97
5	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80	0,61	76,25

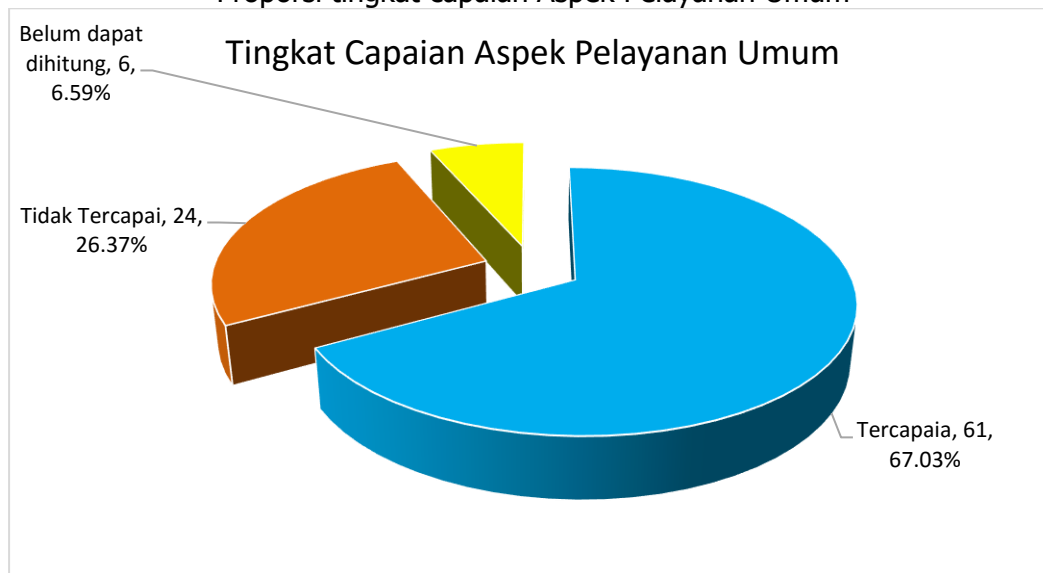
Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2021

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 61 indikator (67,03%) tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 24 indikator (24,37%) belum memenuhi target, namun 8 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 90%. Dan masih terdapat 8 indikator belum tersedia (*Not Available*) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Harapan Lama Sekolah, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Indeks Pendidikan, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Profesionalisme ASN, Nilai Tukar Petani, Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB), Persentase Geosites yang Tertata, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Persentase PMKS yang tertangani, Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan

Bencana), Persentase penurunan konflik social, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Persentase Balita Stunting, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Persentase Koperasi Aktif, Indeks Kualitas Air Laut, Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Nilai Realisasi Investasi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Tingkat Pengangguran Terbuka, Cakupan Penempatan Transmigran, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Persentase konektivitas transportasi public, Nilai Tukar Nelayan, Indeks Kualitas Air, Rata-rata Lama Sekolah, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Pertumbuhan Industri, Indeks Kapasitas Daerah, Cakupan Air Minum, Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Rasio Elektrifikasi, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase Kemantapan jalan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR), Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan social, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, Opini BPK, Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, dan Nilai SAKIP

Grafik. 3. 8.
Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas dan program unggulan;
3. Dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 108,79 persen dengan capaian keuangan sebesar 98,53 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan IV sebelumnya yaitu sebesar 62,16 persen untuk capaian kinerja, dan 43,82 persen untuk capaian keuangan..
4. Terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2021. Sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2021, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya adalah Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target antara lain: Angka Harapan Hidup, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Indeks Pelayanan Publik, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk

Hukum Daerah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

5. Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB tahun 2021 secara keseluruhan terdapat 68 indikator atau 66,02 persen tercapai sesuai target bahkan melampaui, 29 indikator belum memenuhi target dan masih terdapat 6 indikator belum tersedia (*Not Available/NA*) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.